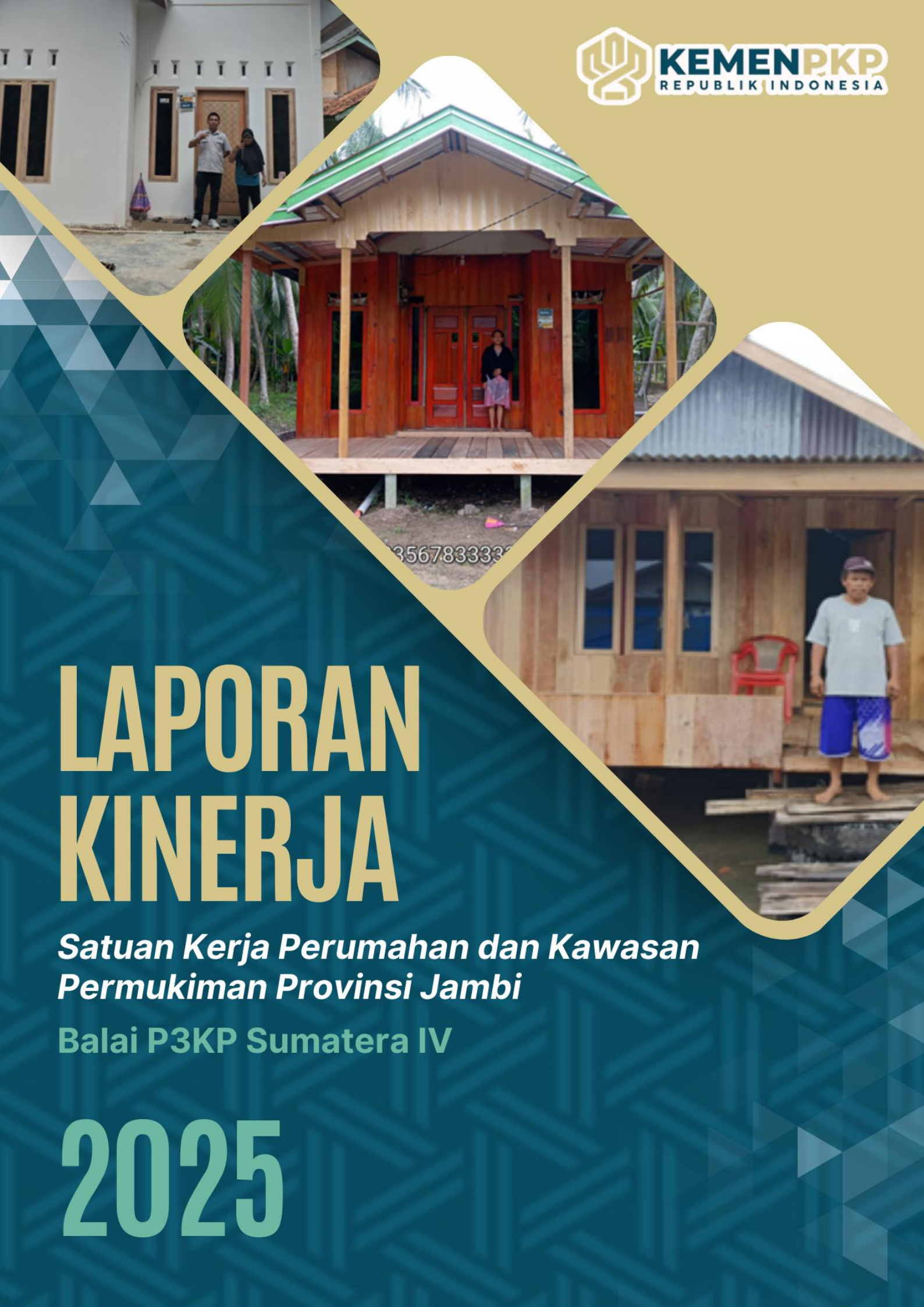




LAPORAN KINERJA

*Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jambi*

Balai P3KP Sumatera IV

2025

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Jambi telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berakhir. Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi bertugas melaksanakan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV untuk menjalankan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yakni berfokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah.

Laporan Kinerja yang menggambarkan dinamika Satker PKP Provinsi Jambi sejak awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan output Satker PKP Provinsi Jambi dalam rangka mendukung capaian sasaran Balai P3KP Sumatera IV sesuai dengan tugas dan fungsinya pada dokumen perencanaan Satker PKP Provinsi Jambi.

Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian PKP.

Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya sehingga terselesaikannya laporan kinerja ini.

Jambi, 06 Januari 2026

Kepala Satuan Kerja

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jambi



Yusra Dwi Yani Safrini, S.T.

NIP. 198001142008012002

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi akan mendukung dan melaksanakan pemenuhan target yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan Kementerian dikemukakan sebagai berikut :

1. Tujuan pertama yaitu “peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. persentase peningkatan rumah layak huni melalui Pembangunan baru;
 - b. persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f. persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;

- g. persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - h. persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 - i. persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni; dan
 - j. persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
2. Tujuan kedua yaitu “peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan tujuan Kementerian PKP tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada tahun 2025 – 2029 akan melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memastikan target pembangunan nasional tercapai secara efektif di wilayah Provinsi Jambi yakni menjalankan fungsi teknis dan administratif sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Teknis dan Operasional di lapangan;
2. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan Daerah;
3. Dukungan Administratif dan Tata Kelola;
4. Strategi Kolaborasi Lintas Sektor.

Secara keseluruhan, peran satuan kerja PKP Provinsi Jambi adalah sebagai ujung tombak operasional yang memastikan setiap kebijakan strategis kementerian diterjemahkan menjadi bangunan

fisik dan layanan perumahan yang nyata bagi masyarakat di Provinsi Jambi.

2. Isu Strategis

Berfokus pada tingginya angka *backlog* perumahan dan rendahnya keterjangkauan hunian layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan generasi milenial. Pesatnya pertumbuhan penduduk di pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan permukiman yang terjangkau, sehingga memicu munculnya hunian liar serta peningkatan jumlah keluarga yang tinggal di rumah kontrakan atau menumpang. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk memperkuat skema pembiayaan perumahan yang inovatif dan mendorong percepatan penyediaan hunian subsidi yang lokasinya tetap terjangkau dari pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan *dashboard* perumahan Kementerian PKP jumlah *backlog* perumahan di provinsi jambi mencapai 348.112 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari *backlog* kepemilikan 10,76% dan *backlog* Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 18,00%, hal ini menjadi perhatian karena jumlah *backlog* perumahan mencapai 28,75% dari jumlah keluarga di Provinsi Jambi.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Jambi yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (P3KP) Sumatera IV di tahun 2025 diberikan tanggung jawab pada peningkatan kualitas RTLH di Provinsi Jambi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sehingga melalui program ini diharapkan mampu membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mengurangi jumlah *backlog* RTLH di Provinsi Jambi.

Adapun Infrastruktur Utama yang dibangun oleh Satker PKP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang tersebar di 11 (sebelas) Kab/Kota di Provinsi Jambi sebanyak 1.527 Unit dan terbagi dalam 3 (tiga) delineasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Delineasi Pesisir
 - Kab. Tanjung Jabung Timur (268 Unit)
 - b. Delineasi Perkotaan
 - Kota Jambi (73 Unit)
 - Kota Sungai Penuh (146 Unit)
 - c. Delineasi Perdesaan
 - Kab. Batanghari (37 Unit)
 - Kab. Bungo (55 Unit)
 - Kab. Kerinci (33 Unit)
 - Kab. Merangin (189 Unit)
 - Kab. Muaro Jambi (71 Unit)
 - Kab. Sarolangun (401 Unit)
 - Kab. Tanjung Jabung Barat (204 Unit)
 - Kab. Tebo (50 Unit)
2. Peningkatan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni, dengan membangun 1 Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI di Perkotaan di Kota Jambi.

3. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Satker PKP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam (tabel.1 Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Jambi TA 2025) di bawah ini:

Table 1. Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Jambi TA 2025

No.	Program Kegiatan	Target Rencana	Realisasi	Ket.
1.	BSPS	1527 Unit	1524 Unit	-
2	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	1 Unit	-	<i>Multiyears</i>

4. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Satker PKP Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat dilihat pada (tabel 2. Realisasi Anggaran Satker PKP Provinsi Jambi TA 2025) di bawah ini:

Table 2. Realisasi Anggaran Satker PKP Provinsi Jambi TA 2025

No.	DIPA	PAGU (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp/%)		Realisasi Fisik
1.	Sekretariat Jenderal	648.237.000	562.587.355	86,73	-
2.	Dirjen Kawasan Permukiman	6.031.148.000	5,894.486.517	97.73	98.28
3.	Dirjen Perdesaan	22.639.507.000	22.418.548.160	99.02	99.97
4.	Dirjen Perkotaan	6.667.441.000	6.405.605.490	96.07	97.13
Total		35.986.333.000	35.281.227.522	98.04	97,74

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL.....	10
DAFTAR GAMBAR.....	11
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Tugas dan Fungsi.....	16
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	17
1.3.1 Struktur Organisasi.....	18
1.4 Sarana dan Prasarana	28
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik	29
1.4.2 Transformasi Digital	30
1.5 Isu Strategis.....	36
1.6 Sistematika Laporan	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA	41
2.1 Rencana Strategis.....	41
2.1.1 Visi dan Misi.....	41
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	43
2.1.3 Program dan Kegiatan	44
2.2 Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian	46
2.2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	47
2.2.2 Perjanjian Kinerja Dirjen Kawasan Permukiman	49
2.2.3 Perjanjian Kinerja Dirjen Perumahan Perdesaan	52
2.2.4 Perjanjian Kinerja Dirjen Perumahan Perkotaan.....	55
2.3 Metode Pengukuran Kinerja.....	58
2.4 DIPA	59
2.4.1 DIPA Sekretariat Jenderal.....	59
2.4.2 DIPA Dirjen Kawasan Permukiman	62

2.4.3 DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan	63
2.4.4 DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan	66
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	69
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	69
3.1.1 Perencanaan Kinerja	69
3.1.2 Pengukuran Kinerja	70
3.1.3 Pelaporan Kinerja	72
3.1.4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	74
3.2 Capaian Kinerja	75
3.2.1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	77
3.2.2 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	78
3.2.3 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni	86
3.2.4 Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Pembangunan Perumahan	90
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja	91
3.4 Analisis Realisasi Anggaran	92
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	94
3.5.1 Sumber Daya Manusia	94
3.5.2 Analisis Efisiensi Penilaian Kinerja Pegawai	95
3.5.3 Analisis Efisiensi Sarana dan Prasarana	97
3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja	99
3.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan	100
BAB IV PENUTUP	101
4.1 Kesimpulan	101
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	102
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Table 1. Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Jambi TA 2025.....	7
Table 2. Realisasi Anggaran Satker PKP Provinsi Jambi TA 2025.....	7
Table 3. Laporan Barang Milik Negara	29
Table 4. Sasaran dan Indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	45
Table 5. Sasaran dan Indikator Program Dukungan Manajemen	46
Table 6.....	70
Table 7. Pelaporan Kinerja Sekretariat Jenderal	72
Table 8. Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	73
Table 9. Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	73
Table 10. Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	74
Table 11. Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi.....	75
Table 12. Perbandingan Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Jambi dengan Renstra dan PK	77
Table 13. Rekapitulasi Pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi	79
Table 14. Analisis Perbandingan Kinerja Satker PKP Provinsi Jambi ..	91
Table 15. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Satker PKP Jambi Tahun 2025	19
Gambar 2. Website Aplikasi myPKP	31
Gambar 3. Website SiRUP LKPP	32
Gambar 4. Website LPSE	33
Gambar 5. Website OM-SPAN Online	34
Gambar 6. Website SAKTI	35
Gambar 7. PK Awal Sekretariat Jenderal TA 2025	47
Gambar 8. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Awal Sekjen	48
Gambar 9. PK Akhir Sekretariat Jenderal TA 2025	48
Gambar 10. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Akhir Sekjen	49
Gambar 11. PK Awal Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025	50
Gambar 12. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Awal Dirjen Kawasan Permukiman	50
Gambar 13. PK Akhir Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025	51
Gambar 14. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Akhir Dirjen Kawasan Permukiman	51
Gambar 15. PK Awal Dirjen Perumahan Perdesaan	52
Gambar 16. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Awal Dirjen Perumahan Perdesaan	53
Gambar 17. PK Akhir Dirjen Perumahan Perdesaan	53
Gambar 18. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Akhir Dirjen Perumahan Perdesaan	54
Gambar 19. PK Awal Dirjen Perumahan Perkotaan	55
Gambar 20. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Awal Dirjen Perumahan Perkotaan	56
Gambar 21. PK Akhir Dirjen Perumahan Perkotaan	56
Gambar 22. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Akhir Dirjen Perumahan Perkotaan	57

Gambar 23. DIPA Awal Sekretariat Jenderal TA 2025	60
Gambar 24. DIPA Akhir Sekretariat Jenderal TA 2025.....	61
Gambar 25. DIPA Awal Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025	62
Gambar 26. DIPA Akhir Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025.....	63
Gambar 27. DIPA Awal Dirjen Perumahan Perdesaan TA 2025.....	64
Gambar 28. DIPA Akhir Dirjen Perumahan Perdesaan TA 2025	65
Gambar 29. DIPA Awal Dirjen Perumahan Perkotaan TA 2025.....	66
Gambar 30. DIPA Akhir Dirjen Perumahan Perkotaan TA 2025	67
Gambar 31. Rangkuman Pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi.....	80
Gambar 32. Peta Lokasi BSPS Kawasan Pesisir	81
Gambar 33. Progres BSPS di Kawasan Pesisir 1	81
Gambar 34. Progres BSPS di Kawasan Pesisir 2.....	82
Gambar 35. Peta Lokasi BSPS Perdesaan	82
Gambar 36. Progres BSPS di Perdesaan 1	83
Gambar 37. Progres BSPS di Perdesaan 2.....	83
Gambar 38. Progres BSPS di Perdesaan 3.....	83
Gambar 39. Peta Lokasi BSPS Perkotaan	84
Gambar 40. Progres BSPS di Perkotaan 1	85
Gambar 41. Progres BSPS di Perkotaan 2.....	85
Gambar 42. Progres BSPS di Perkotaan 3.....	85
Gambar 43. Lokasi Rusun dari atas setelah pembersihan lahan.....	87
Gambar 44. TTD Kontrak MK PT. Alocita Mandiri.....	88
Gambar 45. TTD Kotrak Fisik CV. Riau Andalan Utama	88
Gambar 46. Pelaksanaan Project Management Consultant (PMC) pada Pembangunan Rumah Susun MA Jambi	89
Gambar 47. Penyerahan Lahan Pembangunan Rusun MA Jambi .	89
Gambar 48. Laporan Akhir BSPS Provinsi Jambi TA 2025.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jambi selaku perpanjangan tangan pusat di daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Kerja sebagai sub sistem dari sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berupaya memenuhi pembangunan khususnya pembangunan bidang perumahan di Provinsi Jambi.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan

yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi organisasi, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang langsung dicapai pada lingkup provinsi dan nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dimana Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Renstra;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber

dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam LAKIP akan diuraikan mengenai *history* suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Satker PKP Provinsi Jambi berkewajiban menyusun LAKIP Tahun Anggaran 2025 dan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Perumahan, sebagaimana telah diatur di dalam:

1. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja / Unit Organisasi / Kementerian Negara / Lembaga, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
2. **Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.
 - Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
3. **Peraturan Menteri PKP Nomor 15 Tahun 2025** tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Laporan Kinerja tahunan unit organisasi dan Laporan Kinerja tahunan satuan kerja ditandatangani oleh masing-masing pimpinan entitas dan disampaikan secara tahunan kepada pimpinan entitas di atasnya, paling lambat 6 (enam) minggu setelah tahun anggaran berakhir untuk Laporan Kinerja unit organisasi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal

Kementerian; dan 4 (empat) minggu setelah tahun anggaran berakhir untuk Laporan Kinerja satuan kerja.

LAKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai Visi dan Misi Satker PKP Provinsi Jambi, Capaian Kinerja tahun ini, Capaian Kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Satker PKP Provinsi Jambi untuk melaksanakan tanggung jawab Kementerian PKP dalam hal mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang difokuskan pada Program 3 Juta Rumah, yang bertujuan menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai motor pertumbuhan ekonomi, dengan dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, serta peningkatan kualitas hidup, sejalan dengan misi "melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa".

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 1 Tahun 2024, tugas dan fungsi satuan kerja di daerah, khususnya yang berada di bawah koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Balai P3KP), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
- b. Melaksanakan program bantuan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat, termasuk verifikasi rumah tidak layak huni di tingkat perdesaan, perkotaan dan pesisir;
- c. Melakukan identifikasi, pemetaan, dan perencanaan penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan sesuai rencana tata ruang daerah;
- d. Mengawasi dan memastikan pembangunan fisik perumahan berjalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pusat;
- e. Melakukan pendampingan serta validasi data calon penghuni rumah susun atau penerima bantuan perumahan agar tepat sasaran;
- f. Menyiapkan proses pemanfaatan, penghunian, dan serah terima aset perumahan yang telah selesai dibangun kepada pemerintah daerah atau penerima manfaat;
- g. Melakukan pengawasan lapangan, evaluasi kinerja keterpaduan program, serta penyusunan laporan progres pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Organisasi Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi memiliki kapasitas yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana, Serta Anggaran dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam Rencana Strategis. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang bebannya semakin bertambah setiap tahunnya. Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi memiliki strategi pengelolaan sumber

daya internal yang dimiliki agar seluruh proses dapat berjalan optimal.

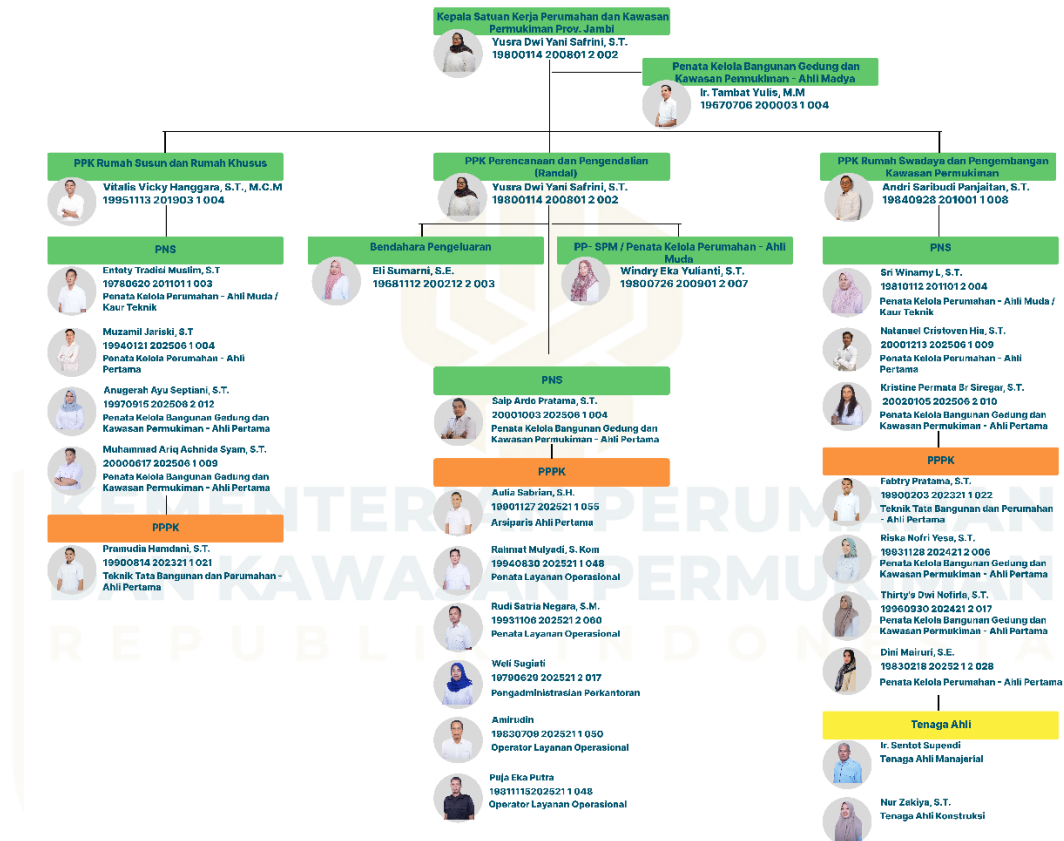
1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor: 150/KPTS/Dp/2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PERumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor: 155/KPTS/Dd/2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor: 15/KPTS/Dk/2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Surat Perintah Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Nomor: 13/SPRIN/RB4/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Susunan organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI



Gambar 1. Struktur Organisasi Satker PKP Jambi Tahun 2025

Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi pada TA 2025 memiliki pegawai sebanyak 27 orang dengan rincian 8 orang PNS, 6 orang CPNS, 11 orang PPPK, dan Tenaga Ahli 2 orang. Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja

Kepala Satuan Kerja merangkap PPK Randal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai DIPA;

- Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui Pusat data dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing unit kerja Eselon I;
- Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan apabila diperlukan;
- Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satuan Kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran / output yang telah ditetapkan;
- Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait;
- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya

kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM;

- Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
- Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
- Melaksanakan kegiatan swakelola;
- Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
- Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

- Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja;
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhanseluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- Bertanggung jawab terhadap materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

PP – SPM mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, meliputi:
 1. Kelengkapan dokumen pendukung SPP (Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format SPP, Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja);
 2. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;

3. Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
4. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian / kontrak / surat keputusan;
5. Menguji kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
6. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
7. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian kontrak
 - Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - Menerbitkan SPM, meliputi: 1. Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA; 2. Menandatangani SPM; 3. Memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA, meliputi:
 1. Jumlah SPP yang diterima;
 2. Jumlah SPM yang diterbitkan dan
 3. Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPP.

4. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi: 1. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan 2. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
- Melaksanakan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran, meliputi: 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 4. Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara.

5. Petugas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA)

Petugas UAKPA mempunyai tugas sebagai berikut:

- Memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi;
- Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi SAK;
- Menerima data SABMN dari petugas akuntansi barang;
- Melakukan verifikasi atas RTH yang dihasilkan aplikasi SAK dengan dokumen sumber (DS);
- Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan
- barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

- Melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan;
- Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA;
- Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA;
- Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.
- Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
- Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
- Melaksanakan pembayaran setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi: meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan pemeriksaan kebenaran atas hak tagih yang meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagih yang harus dibayar dan jadwal waktu pembayaran
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen;
- Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

6. Petugas Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)

- Melaksanakan proses pembukuan;
- Menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan dan/atau dokumen pengelolaan, membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);

- Melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN termasuk Tanah dan Bangunan ke dalam daftar barang, meliputi: 1. Penetapan Status Penggunaan BMN; 2. Pemanfaatan BMN; 3. Penghapusan BMN; 4. Pemindahtanganan BMN; dan 5. Inventarisasi BMN.
- Melaporkan BMN yang didaftarkan dan dicatat dalam daftar barang;
- Melakukan penghimpunan data BMN selain tanah dan/atau bangunan;
- Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- Menyusun Laporan BMN dan Laporan Kondisi Barang Tingkat UAKPB;
- Menyiapkan pendistribusian laporan BMN dan laporan kondisi barang tingkat UAKPB;
- Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

7. Penelaah Keuangan

Penelaah Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen terkait urusan administrasi umum dan keuangan;
- Melakukan penata usahaan kantor dan kepegawaian;
- Melakukan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- Melakukan penyusunan jadwal alokasi anggaran;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran;
- Melakukan penyusunan laporan berkala realisasi anggaran;

- Melakukan penyusunan laporan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan.

8. Pelaksana Teknik

Pelaksana Teknik mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang perencanaan teknik dan penyusunan;
- Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumentasi Tender;
- Menyiapkan dokumen kontrak;
- Menyusun usulan program kegiatan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi;
- Melaksanakan Survey Lokasi Kegiatan;
- Mengkoordinir pengawasan oleh Konsultan Pengawas;
- Melaporkan hasil pelaksanaan dilapangan kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal

9. Petugas My PKP (Monitoring)

Petugas My PKP (Monitoring) mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi;
- Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan;
- Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progress fisik dan realisasi keuangan);
- Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja;
- Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan;
- Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi My PKP setiap kali ada perubahan dan informasi;
- Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan;

- Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan.

10. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- Melaksanakan persiapan dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

11. Tenaga Ahli

- Membantu tugas-tugas administrasi perkantoran sesuai dengan bidang keahliannya;
- Membantu Pejabat/Staf dalam membuat laporan;
- Membantu Pelaksanaan tugas yang terkait dengan tugas pokok unit kerja terkait.

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi di dukung sarana dan prasarana yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau BMN. Oleh karena itu, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan BMN untuk menunjang fungsi pelayanan Satker PKP Provinsi Jambi kepada masyarakat. Semaksimal mungkin, BMN dapat mendukung kelancaran tugas serta memungkinkan fungsi *budgeter* dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara.

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Pada tahun anggaran 2025, Satker PKP Provinsi Jambi masih melakukan sewa bangunan sebagai kantor dan sewa gudang sebagai tempat menyimpan arsip kesatkeran beberapa tahun belakangan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya bangunan milik sendiri yang dapat digunakan sebagai kantor dan tempat penyimpanan berkas. Sedangkan untuk penunjang pekerjaan lainnya Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi memiliki sarana dan prasarana BMN. Berikut sarana dan prasarana BMN berdasarkan laporan BMN tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Table 3. Laporan Barang Milik Negara

URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KONDISI
Note Book	1	15.499.000	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	10.350.000	Baik
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	7.600.000	Baik
Camera Digital	1	3.930.300	Baik
Drone	2	56.243.000	Baik
Televisi	1	6.484.500	Baik
Laptop	15	269.285.000	Baik

Lemari Besi/Metal	3	9.000.000	Baik
Sofa	1	5.300.000	Baik
Meja Rapat	3	26.479.000	Baik
Alat Penghancur Kertas	4	7.000.000	Baik
Kursi Besi/Metal	39	77.000.000	Baik
A.C. Split	8	43.600.000	Baik
GPS Receiver	1	5.000.000	Baik
Filing Cabinet Besi	5	18.185.200	Baik
Brandkas	1	4.900.500	Baik
Meja Kerja Besi/Metal	1	2.000.000	Baik
Meja Kerja Kayu	33	97.446.000	Baik
LCD Projector/Infocus	1	7.375.500	Baik
Facsimile	1	1.436.600	Baik

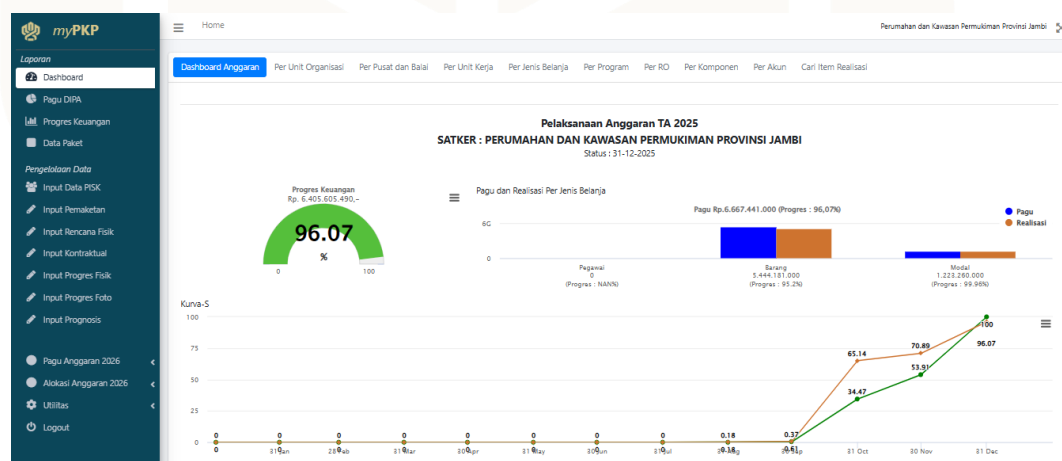
1.4.2 Transformasi Digital

Pelaksanaan kegiatan di Satker PKP Provinsi Jambi ditunjang dengan teknologi informasi yang sudah dimanfaatkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efisien, cepat, tepat dan akuntabel. Berikut kami sampaikan teknologi informasi yang dipakai oleh Satker PKP Provinsi Jambi:

1. **myPKP**

Aplikasi *myPKP* merupakan sebuah inovasi transformasi digital yang dirancang secara komprehensif oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pusat kendali layanan perumahan nasional. Secara deskriptif, aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan interaktif yang mengintegrasikan kebutuhan masyarakat, data pengembang, dan pengawasan pemerintah dalam satu ekosistem virtual. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses transparansi data mengenai ketersediaan hunian layak huni, melakukan pendaftaran program bantuan pembiayaan seperti rumah subsidi, hingga memantau status pengajuan mereka secara real-time tanpa harus melewati birokrasi fisik yang rumit.

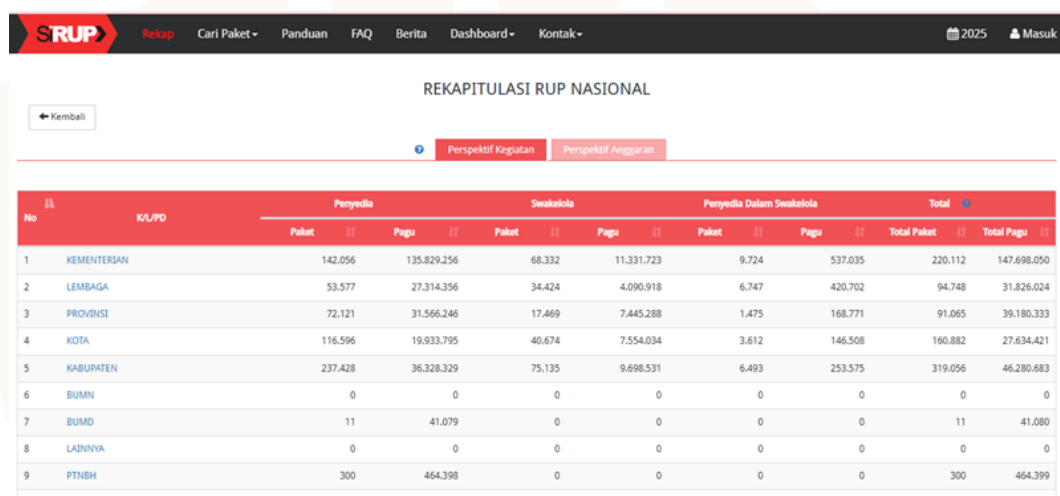
Dalam aspek tata kelola, My PKP mentransformasi cara kerja internal kementerian dari sistem manual yang lambat menjadi sistem digital yang responsif dan transparan. Aplikasi ini memungkinkan koordinasi lintas unit kerja mulai dari bagian perencanaan, pendanaan, hingga pengawasan lapangan berjalan dalam satu *platform* yang sama (*single platform*). Hal ini meminimalkan risiko terjadinya tumpang tindih data dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk perumahan rakyat dapat ditelusuri penggunaannya secara akurat. Melalui dasbor analitik yang tersedia, para pengambil keputusan di kementerian dapat melihat potret kemajuan fisik bangunan di lapangan secara real-time, sehingga jika terjadi kendala pada suatu proyek, intervensi dapat dilakukan dengan segera.



Gambar 2. Website Aplikasi myPKP

2. SiRUP LKPP

SiRUP adalah Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya. SiRUP berfungsi sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara nasional.



No	K/L/PO	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	KEMENTERIAN	142.056	135.829.256	68.332	11.331.723	9.724	537.035	220.112	147.698.050
2	LEMBAGA	53.577	27.314.356	34.424	4.090.918	6.747	420.702	94.748	31.826.024
3	PROVINSI	72.121	31.566.246	17.469	7.445.288	1.475	168.771	91.065	39.180.333
4	KOTA	116.596	19.933.795	40.674	7.554.034	3.612	146.508	160.882	27.634.421
5	KABUPATEN	237.428	36.328.329	75.135	9.698.531	6.493	253.575	319.056	46.280.683
6	BUMN	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BUMD	11	41.079	0	0	0	0	11	41.080
8	LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PTNBN	300	464.398	0	0	0	0	300	464.399

Gambar 3. Website SiRUP LKPP

3. LPSE / e-Procurement

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. *e-Procurement* bertujuan untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui media elektronik antara Pokja dan Penyedia Jasa. Selain itu *e-Procurement* juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya Mengurangi kontak fisik yang dapat

menimbulkan risiko KKN baik antar Penyedia, maupun antara Penyedia dengan PPK/Pokja, membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat, menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia, dan meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan.



Gambar 4. Website LPSE

4. OM-SPAN Online

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web dapat yang diakses melalui browser web seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan browser lainnya.

Basis data (database) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN diambil dari Aplikasi SPAN utama (core SPAN). Pengambilan data tidak dilakukan secara realtime, namun dengan jeda waktu

tertentu. Jika terdapat perbedaan informasi yang disajikan oleh Aplikasi OMSPAN dengan yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, maka yang dipergunakan adalah informasi yang dihasilkan dari Aplikasi SPAN. Aplikasi SPAN bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan negara. Efisiensi diperoleh melalui integrasi system sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi akuntabel dan transparan.



Gambar 5. Website OM-SPAN Online

5. Aplikasi SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan

Kementerian Negara / Lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited dan audit. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Masing – masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul – modul aplikasi sebagai berikut:

- Proses penganggaran diperankan oleh modul penganggaran;
- Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul komitmen (meliputi sub – modul Manajemen Supplier dan sub – modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan dan modul Pembayaran;
- Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.



Gambar 6. Website SAKTI

1.5 Isu Strategis

Berfokus pada tingginya angka *backlog* perumahan dan rendahnya keterjangkauan hunian layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan generasi milenial. Pesatnya pertumbuhan penduduk di pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan permukiman yang terjangkau, sehingga memicu munculnya hunian liar serta peningkatan jumlah keluarga yang tinggal di rumah kontrakan atau menumpang. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk memperkuat skema pembiayaan perumahan yang inovatif dan mendorong percepatan penyediaan hunian subsidi yang lokasinya tetap terjangkau dari pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan *dashboard* perumahan Kementerian PKP jumlah *backlog* perumahan di provinsi jambi mencapai 348.112 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari *backlog* kepemilikan 10,76% dan *backlog* Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 18,00%, hal ini menjadi perhatian karena jumlah *backlog* perumahan mencapai 28,75% dari jumlah keluarga di Provinsi Jambi.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Jambi yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (P3KP) Sumatera IV di tahun 2025 diberikan tanggung jawab pada peningkatan kualitas RTLH di Provinsi Jambi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sehingga melalui program ini diharapkan mampu membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mengurangi jumlah *backlog* RTLH di Provinsi Jambi. Adapun Infrastruktur Utama yang dibangun oleh Satker PKP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang tersebar di 11 (sebelas) Kab/Kota di Provinsi Jambi sebanyak 1.527 Unit dan terbagi dalam 3 (tiga) delineasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Delineasi Pesisir
 - Kab. Tanjung Jabung Timur (268 Unit)
 - b. Delineasi Perkotaan
 - Kota Jambi (73 Unit)
 - Kota Sungai Penuh (146 Unit)
 - c. Delineasi Perdesaan
 - Kab. Batanghari (37 Unit)
 - Kab. Bungo (55 Unit)
 - Kab. Kerinci (33 Unit)
 - Kab. Merangin (189 Unit)
 - Kab. Muaro Jambi (71 Unit)
 - Kab. Sarolangun (401 Unit)
 - Kab. Tanjung Jabung Barat (204 Unit)
 - Kab. Tebo (50 Unit)
2. Peningkatan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni, dengan membangun 14 Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI di Perkotaan di Kota Jambi.

1.6 Sistematika Laporan

Penyusunan LAKIP Satker PKP Provinsi Jambi menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi.

- Latar Belakang
Pada subbab ini diuraikan esensi penyusunan Laporan Kinerja tahunan.
- Tugas dan Fungsi

Pada subbab ini menjelaskan tentang history suatu instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pada subbab ini menjelaskan tentang bagan struktur organisasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sarana dan Prasarana

Menjelaskan tentang sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik ataupun digital yang mendukung pencapaian Kinerja.

- Isu Strategis

Menjelaskan informasi atas kondisi/hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan/atau perumusan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di masa yang akan datang.

- Sistematika Laporan

Dalam subbab ini memuat sistematika penulisan Laporan Kinerja tahunan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disampaikan perencanaan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

- Rencana Strategis

Menjelaskan visi, misi, tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, arah kebijakan, dan strategi satuan kerja.

- Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Menguraikan Perjanjian Kinerja dan kerangka pendanaan, serta kronologi perubahan Perjanjian Kinerja.

- Metode Pengukuran
Menjelaskan metode Pengukuran Kinerja berdasarkan Renstra/
dokumen perencanaan
- DIPA
Menguraikan rincian *timeline* DIPA

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis capaian Kinerja dan anggaran sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja sejak diterima DIPA sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

- Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan komponen Hasil Evaluasi AKIP yaitu perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan Kinerja, dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal.
- Capaian Kinerja
Menguraikan tentang capaian Kinerja tahunan dibandingkan dengan target sesuai Renstra dan Perjanjian Kinerja.
- Analisis Perbandingan Kinerja
Menguraikan analisis perbandingan capaian Kinerja tahunan dengan tahun sebelumnya terhadap target capaian Renstra.
- Analisis Realisasi Anggaran
Menguraikan analisis perbandingan anggaran dan belanja dengan realisasi penggunaan anggaran sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku.
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Menguraikan kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai keluaran yang maksimal dalam mencapai target Satker PKP Provinsi Jambi.
- Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Menguraikan analisis pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja.

- Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan
Menjelaskan faktor yang mendukung keberhasilan dan faktor yang menghambat capaian setiap Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Satker PKP Provinsi Jambi.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan upaya-upaya yang akan dilakukan selama tahun anggaran untuk mencapai target tahunan.

- Kesimpulan
Bagian ini berisi ringkasan umum yang menjelaskan tiap-tiap bab secara naratif, ringkas, dan padat.
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Menyajikan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian Kinerja pada tahun selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis memuat hal-hal yang terkait dengan Sistem AKIP dan pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi. Muatan Dokumen Perencanaan meliputi tujuan, kebijakan, Indikator Kinerja program, dan kegiatan. Berdasarkan Dokumen Perencanaan, disusun Rencana Kinerja yang dilanjutkan dengan penandatanganan Penetapan Kinerja (PK) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2025.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Presiden: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Berdasarkan visi Presiden tahun 2025–2029 tersebut, maka Kementerian PKP menyelaraskan visi Kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan serta sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025–2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden memiliki misi yaitu delapan asta cita dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan asta cita tersebut dan amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Kementerian PKP menjadi pendukung utama asta cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi

dan Pemberantasan Kemiskinan” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029, serta mendukung terlaksananya astacita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Sejalan dengan kebijakan pembangunan perumahan yang dimuat dalam dokumen RPJPN, RPJMN, dan Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Kementerian PKP untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan sektor secara efektif. Rumusan ini menjadi dasar dalam penetapan fokus pembangunan, penguatan tata kelola, serta penyusunan langkah strategis yang mendukung pencapaian sasaran jangka menengah. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian PKP dijabarkan berikut ini.

1. Peran strategis kementerian, diarahkan dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana arahan oleh Presiden dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Dalam kerangka tersebut, Presiden menetapkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah. Untuk merealisasikan target tersebut secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian meluncurkan inisiatif “Karpet Merah untuk Rakyat” sebagai upaya percepatan dalam pembangunan dan renovasi rumah rakyat.
2. Percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Meningkatkan kualitas pengawasan intern dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian PKP guna menjamin integritas organisasi.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan kehandalan infrastruktur Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka ditetapkan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV. Penetapan sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV adalah “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Jambi” yang akan dicapai melalui 2 Program, yaitu:

1. Program Teknis

Program teknis yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal). Program teknis meliputi program ketahanan sumber daya air, program infrastruktur konektivitas dan program perumahan dan Kawasan. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. yang dicapai melalui program “Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni”, dimana program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni. Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV, penyelenggaraan ketersediaan rumah layak huni dilaksanakan dengan 8 kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan;

- b. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
- c. Penyediaan Rumah Susun;
- d. Pemeliharaan Rumah Susun;
- e. Penyediaan Rumah Khusus;
- f. Pemeliharaan Rumah Khusus;
- g. Rumah Umum yang Mendapat fasilitas layanan Bantuan PSU;
- h. Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Table 4. Sasaran dan Indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

SASARAN		INDIKATOR
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau di Provinsi Jambi	
Sasaran Program	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman layak huni di Provinsi Jambi	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusun Perencanaan Penyediaan Perumahan 2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 3. Jumlah Rumah Susun yang di bangun 4. Jumlah Rumah Susun yang di pelihara 5. Jumlah Rumah Khusus yang di bangun 6. Jumlah Rumah Umum yang mendapat fasilitasi Layanan Bantuan PSU

2. Program Generik

Program generic yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/ Unit Kerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan. Program generic meliputi program pendidikan dan pelatihan vokasi serta program dukungan manajemen. Program dukungan

Manajemen dicapai melalui program kegiatan Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan yang ditujukan untuk memastikan optimalisasi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Layanan sarana dan prasarana internal
- b. Layanan dukungan manajemen satker
- c. Layanan perkantoran

Table 5. Sasaran dan Indikator Program Dukungan Manajemen

SASARAN		INDIKATOR
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BP3KP Sumatera IV dan Tugas Teknis Lainnya	
Sasaran Program	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal 2. Jumlah Layanan Perkantoran

2.2 Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian

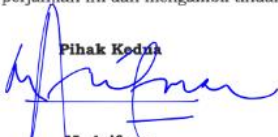
Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Jambi diamanatkan untuk melaksanakan program di 4 (empat) DIPA unit organisasi yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Perjanjian Kinerja Awal pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dengan pagu awal sebesar Rp327.621.000,00.

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		PK AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025		
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:		
Nama	: Yusra Dwi Yani Safrini	
Jabatan	: Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	
Selanjutnya disebut Pihak Pertama		
Nama	: M. Arifman	
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	
Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua		
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:		
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.		
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.		
 M. Arifman NIP. 19750922 200212 1 003	Jambi, 01 Juli 2025 Pihak Pertama  Yusra Dwi Yani Safrini NIP. 19810421 200812 2 001	

Gambar 7. PK Awal Sekretariat Jenderal TA 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SEKRETARIAT JENDRAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan

KEGIATAN
 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

ANGGARAN
 Rp 327.621.000,00
 Rp 327.621.000,00

Jambi, 01 Juli 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV



M. ARIFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI



YUSRA DWI YANI SAFRINI

Gambar 8. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Awal Sekjen

2. Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Sejalan dengan dinamika pemenuhann anggaran, DIPA Sekjen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga pagu akhir berdasarkan DIPA revisi akhir adalah sebesar Rp648.337.000,00.


 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PK AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yusra Dwi Yani Safrini**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
 Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 01 Desember 2025

Pihak Kedua



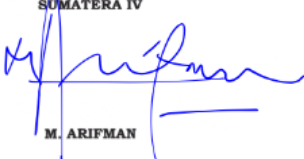
M. Arifman
 NIP. 19750922 200212 1 003

Pihak Pertama



Yusra Dwi Yani Safrini
 NIP. 19810421 200812 2 001

Gambar 9. PK Akhir Sekretariat Jenderal TA 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV			
SEKRETARIAT JENDRAL			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan
KEGIATAN		ANGGARAN	
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi		Rp	648.237.000,00
		Rp	648.237.000,00
Jambi, 01 Desember 2025			
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV		KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI	
			
M. ARIFMAN		YUSRA DWI YANI SAFRINI	

Gambar 10. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Akhir Sekjen

3. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 2 (dua) kali, meliputi:

- Revisi Perjanjian Kinerja ke-1 pada bulan Oktober terkait revisi penambahan anggaran semula Rp327.621.000,00 menjadi Rp512.157.000,00 dengan sasaran dan target kinerja tetap sama yakni 1 layanan.
- Revisi Perjanjian Kinerja ke-2 pada bulan November terkait revisi penambahan anggaran semula Rp512.157.000,00 menjadi Rp648.237.000,00 dengan sasaran dan target kinerja tetap sama yakni 1 layanan.

2.2.2 Perjanjian Kinerja Dirjen Kawasan Permukiman

1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Perjanjian Kinerja Awal pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dengan pagu awal sebesar Rp5.164.931.000,00.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yusra Dwi Yani Safrini**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
 Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


M. Arifman
 NIP. 19750922 200212 1 003

Jambi, 13 September 2025


Yusra Dwi Yani Safrini
 NIP. 19810421 200812 2 001

Gambar 11. PK Awal Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI
 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
 DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	227 Unit

KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

ANGGARAN

Rp 5.164.931.000,00
 Rp 5.164.931.000,00

Jambi, 13 September 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA IV


M. ARIFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAMBI


YUSRA DWI YANI SAFRINI

Gambar 12. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Awal Dirjen Kawasan Permukiman

2. Perjanjian Kinerja (PK) Akhir



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PK AKHIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yusra Dwi Yani Safrini**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
 Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


M. Arifman
 NIP. 19750922 200212 1 003

Jambi, 24 November 2025


Yusra Dwi Yani Safrini
 NIP. 19810421 200812 2 001

Gambar 13. PK Akhir Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh 2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1 Laporan 268 Unit

KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

ANGGARAN

Rp 6.031.148.000,00
 Rp 6.031.148.000,00

Jambi, 24 November 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA IV


M. ARIFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAMBI


YUSRA DWI YANI SAFRINI

Gambar 14. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Akhir Dirjen Kawasan Permukiman

3. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan revisi sebanyak

1 (satu) kali, yakni pada bulan Oktober terkait revisi penambahan anggaran semula Rp5.164.931.000,00 menjadi Rp6.031.148.000,00 dan perubahan target pada sasaran kegiatan ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman yang awalnya 227 unit bertambah menjadi 268 unit.

2.2.3 Perjanjian Kinerja Dirjen Perumahan Perdesaan

1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Perjanjian Kinerja Awal pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dengan pagu awal sebesar Rp107.519.000,00.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yusra Dwi Yani Safrini**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
 Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 04 Juli 2025

Pihak Kedua
 M. Arifman
 NIP. 19750922 200212 1 003

Pihak Pertama
 Yusra Dwi Yani Safrini
 NIP. 19810421 200812 2 001

Gambar 15. PK Awal Dirjen Perumahan Perdesaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan

KEGIATAN
 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

ANGGARAN
 Rp 107.519.000,00
 Rp 107.519.000,00

Jambi, 04 Juli 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV



M. ARIFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI



YUSRA DWI YANI SAFRINI

Gambar 16. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Awal Dirjen Perumahan Perdesaan

2. Perjanjian Kinerja (PK) Akhir


 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yusra Dwi Yani Safrini**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

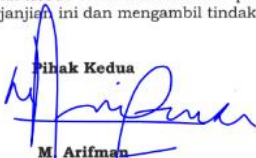
Nama : **M. Arifman**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
 Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 24 November 2025

Pihak Kedua



M. Arifman
 NIP. 19750922 200212 1 003

Pihak Pertama



Yusra Dwi Yani Safrini
 NIP. 19810421 200812 2 001

Gambar 17. PK Akhir Dirjen Perumahan Perdesaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV			
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1040 Unit
KEGIATAN		ANGGARAN	
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi		Rp	22.639.507.000,00
		Rp	22.639.507.000,00
Jambi, 24 November 2025			
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV		KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI	
			
M. ARIFMAN		YUSRA DWI YANI SAFRINI	

Gambar 18. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Akhir Dirjen Perumahan Perdesaan

3. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 2 (dua) kali, meliputi:

- Revisi Perjanjian Kinerja ke-1 pada bulan Agustus terkait revisi penambahan anggaran semula Rp107.519.000,00 menjadi Rp23.325.451.000,00 dan penambahan sasaran kegiatan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan dengan target 1078 unit.
- Revisi Perjanjian Kinerja ke-2 pada bulan Oktober terkait revisi sasaran kegiatan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan dengan target sebelumnya 1078 unit menjadi 1040 unit sehingga anggaran berkurang menjadi Rp22.639.507.000,00.

2.2.4 Perjanjian Kinerja Dirjen Perumahan Perkotaan

1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Perjanjian Kinerja Awal pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dengan pagu awal sebesar Rp104.421.000,00.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

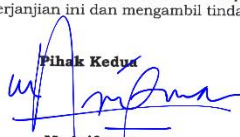
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yusra Dwi Yani Safrini**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
 Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua
M. Arifman
 NIP. 19750922 200212 1 003

Jambi, 01 Agustus 2025



Pihak Pertama
Yusra Dwi Yani Safrini
 NIP. 19810421 200812 2 001

Gambar 19. PK Awal Dirjen Perumahan Perkotaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1 Unit

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

ANGGARAN
Rp 104.421.000,00
Rp 104.421.000,00

Jambi, 01 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV



M. ARIFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI



YUSRA DWI YANI SAFRINI

Gambar 20. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Awal Dirjen Perumahan Perkotaan

2. Perjanjian Kinerja (PK) Akhir


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yusra Dwi Yani Safrini**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

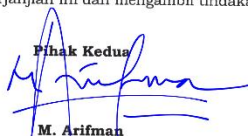
Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
Selaku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 25 November 2025

Pihak Kedua



M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

Pihak Pertama



Yusra Dwi Yani Safrini
NIP. 19810421 200812 2 001

Gambar 21. PK Akhir Dirjen Perumahan Perkotaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV			
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	219 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp 6.667.441.000,00
	Rp 6.667.441.000,00

Jambi, 25 November 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV



M. ARIFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI



YUSRA DWI YANI SAFRINI

Gambar 22. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Akhir Dirjen Perumahan Perkotaan

3. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 4 (empat) kali, meliputi:

- Revisi Perjanjian Kinerja ke-1 pada tanggal 15 bulan Agustus terkait revisi penambahan anggaran semula Rp104.421.000,00 menjadi Rp526.400.000,00 dan penambahan sasaran kegiatan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan dengan target 1 unit.
- Revisi Perjanjian Kinerja ke-2 pada tanggal 25 bulan Agustus terkait revisi sasaran kegiatan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan dengan target sebelumnya 1 unit menjadi 222 unit sehingga anggaran bertambah menjadi Rp5.375.843.000,00.

- c. Revisi Perjanjian Kinerja ke-3 pada tanggal 08 bulan Oktober terkait penambahan sasaran kegiatan ketersediaan rumah baru layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun di wilayah perkotaan dengan target 1 unit Rumah Susun sehingga anggaran bertambah menjadi Rp6.728.074.000,00.
- d. Revisi Perjanjian Kinerja ke-4 pada tanggal 17 bulan Oktober terkait revisi sasaran kegiatan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan dengan target sebelumnya 222 unit menjadi 219 unit sehingga anggaran berkurang menjadi Rp6.667.441.000,00.

2.3 Metode Pengukuran Kinerja

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi mengukur kinerjanya menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan sistem standar untuk seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Metode pengukuran kinerja yang digunakan yaitu metode:

- a. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Penyerapan anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi hingga akhir tahun anggaran 2025 dengan rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

- i. P: Penyerapan Anggaran (4 DIPA)
- ii. RA: Akumulasi Realisasi Anggaran (4 DIPA)

iii. PA: Akumulasi Pagu Anggaran (4 DIPA)

2.4 DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen resmi pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berfungsi sebagai dasar operasional pengeluaran negara, pencairan dana, dan alat pengendali/pengawasan APBN. DIPA memuat rincian anggaran belanja negara, rencana penarikan dana, dan perkiraan penerimaan dalam satu tahun anggaran. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi diamanatkan untuk melaksanakan program di 4 (empat) DIPA unit organisasi yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

2.4.1 DIPA Sekretariat Jenderal

DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025 dengan pagu awal sebesar Rp79.531.000 yang dikeluarkan pada 02 Desember 2024.

1. DIPA Awal

DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Sekreariat Jenderal Tahun Anggaran 2025, dengan pagu awal sebesar Rp79.531.000,00 yang dikeluarkan pada 02 Desember 2024.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691388/2025



0014000 1100 6707 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (19)	JAMBI
4. Kode Nama Saker	: (001388)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Sebesar	: Rp.	79.531.000 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen		Rp.	Jumlah Uang	
146.01.WA	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		Rp.		79.531.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	79.531.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBDN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN J A M B I	(012) Rp.	79.531.000
-------------------	-----------	------------

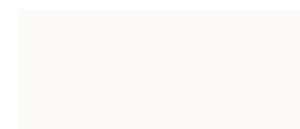
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Indak (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakur dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

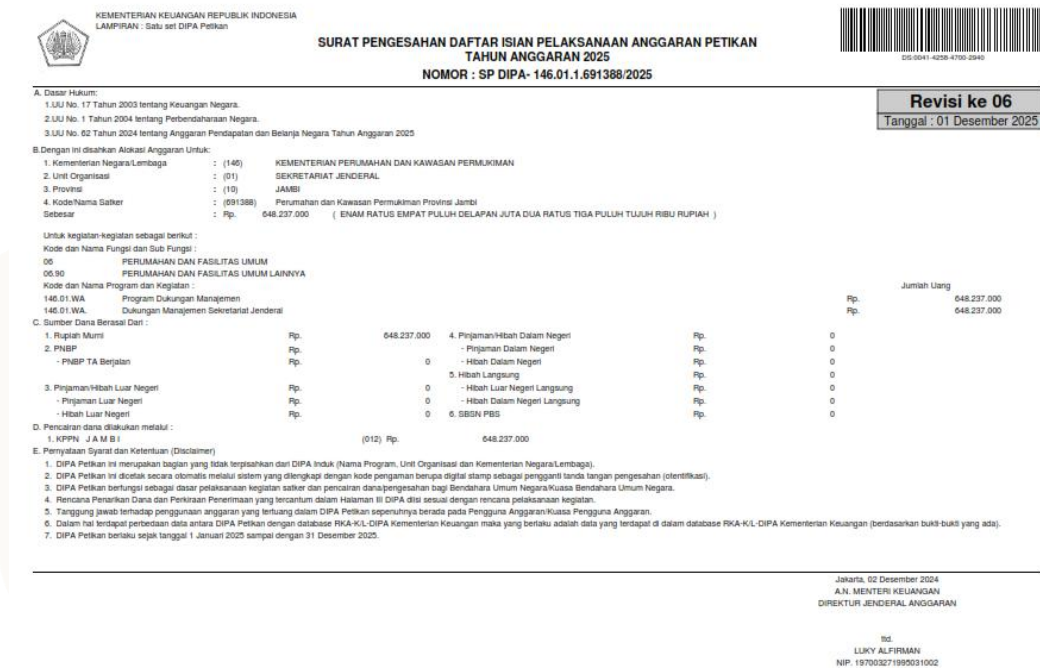
BU
 SUHAHSIL NAZARA
 NIP. 197011231998031006

Gambar 23. DIPA Awal Sekretariat Jenderal TA 2025



2. DIPA Akhir

DIPA Akhir Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025, dengan pagu awal sebesar Rp648.237.000,00 yang dikeluarkan pada 01 Desember 2025.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691388/2025

Revisi ke 06
Tanggal : 01 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

B. Dengan Ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (10) JAMBI
4. Kode Nama Sater : (091388) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Sebesar : Rp. 648.237.000 (ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Sumber Dana Berasal Dari :		Jumlah Uang	
1. Rupiah Murni	Rp. 648.237.000	Rp.	648.237.000
2. PNBP	Rp. 0	Rp.	648.237.000
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0		
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0		
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0		
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0		
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0		
5. Hibah Langsung	Rp. 0		
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0		
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0		
6. SBDN PBS	Rp. 0		
D. Pencatatan dana dilakukan melalui :			
1. KPPN J A M B I	(012) Rp. 648.237.000		

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sater dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Dr.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271990031002

Gambar 24. DIPA Akhir Sekretariat Jenderal TA 2025

3. Kronologi Revisi DIPA

DIPA pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 5 (lima) kali, meliputi:

- Revisi DIPA ke-1 pada bulan Juni terkait revisi penambahan anggaran semula Rp79.531.000,00 menjadi Rp327.621.000,00.
- Revisi DIPA ke-2 pada bulan Juli terkait revisi POK DIPA, sehingga anggaran tetap sama Rp327.621.000,00.
- Revisi DIPA ke-3 pada bulan Agustus terkait revisi POK DIPA, sehingga anggaran tetap sama Rp327.621.000,00.

- d. Revisi DIPA ke-4 pada bulan Oktober terkait revisi penambahan anggaran semula Rp327.621.000,00 menjadi Rp512.157.000,00.
- e. Revisi DIPA ke-5 pada bulan November terkait revisi penambahan anggaran semula Rp512.157.000,00 menjadi Rp 648.237.000,00.

2.4.2 DIPA Dirjen Kawasan Permukiman

DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Dirjen Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 dengan pagu awal sebesar Rp 5.164.931.000,00 yang dikeluarkan pada 02 Desember 2024.

1. DIPA Awal

DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Dirjen Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025, dengan pagu awal sebesar Rp 5.164.931.000,00 yang dikeluarkan pada 02 Desember 2024.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691442/2025



010 9900 10000 1 691 442 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (16)	JAMBI
4. Kode/Nama Sather : (691442)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Sebesar : Rp. 5.164.931.000	(LIMA MILIAR SERATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.03.1A.7099 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Berasal Dari :	Jumlah Uang
1. Rujukan Murni	Rp. 5.164.931.000
2. PNBSP	Rp. 0
PNBSP TA Berjalan	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0
Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0
Hibah Luar Negeri	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0
Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
6. SBSN PBS	Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :	Rp. 0
1. KPKN J A M B I	(012) Rp. 5.164.931.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sather dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman B DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database PKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database PKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271990031002

Gambar 25. DIPA Awal Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025

2. DIPA Akhir

DIPA Akhir Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Dirjen Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025, dengan pagu awal sebesar Rp6.031.148.000 yang dikeluarkan pada 24 November 2025.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691442/2025



146-0303-0000-0000-14205

Revisi ke 03
Tanggal : 24 November 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (10)	JAMBI
4. Kode/Nama Saker : (031442)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Sebesar : Rp. 6.031.148.000	(ENAM MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.03.1A.7059 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Berasal Dari :	
1. Rupiah Murni	Rp. 6.031.148.000
2. PNBP	Rp. 0
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
6. SBDN PBS	Rp. 0
D. Pencatatan dana dilakukan melalui :	
1. KPPN J A M B I	(012) Rp. 6.031.148.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengantar digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saktir dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271990031002

Gambar 26. DIPA Akhir Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025

3. Kronologi Revisi DIPA

DIPA pada Dirjen Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 2 (dua) kali, meliputi:

- a. Revisi DIPA ke-1 pada bulan September terkait revisi POK DIPA, sehingga anggaran tetap sama Rp5.164.931.000.
- b. Revisi DIPA ke-2 pada bulan Oktober terkait revisi penambahan anggaran semula Rp5.164.931.000 menjadi Rp6.031.148.000.

2.4.3 DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan

DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Dirjen Perumahan Perdesaan

Tahun Anggaran 2025 dengan pagu awal sebesar Rp13.411.392.000 yang dikeluarkan pada 02 Desember 2024.

1. DIPA Awal

DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Dirjen Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025, dengan pagu awal sebesar Rp13.411.392.000 yang dikeluarkan pada 02 Desember 2024.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691496/2025



0307167-4108-3105-5045

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 02 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi : (10)	JAMBI
4. Kode/Nama Saker : (09496)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Sebesar : Rp. 13.411.392.000	(TIGA BELAS MILIAR EMPAT RATUS SEBELAS JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.1A Program Penunatan dan Kawasan Permukiman

146.04.1A.7060 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

C. Sumber Dana Berasal Dari :	Jumlah Uang
1. Rupaiah Murni	Rp. 13.411.392.000
2. PNBP	Rp. 0
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
6. SBBN PBS	Rp. 0
D. Penarikan dana dilakukan melalui :	Rp. 0
1. KPKN J A M B I	(012) Rp. 13.411.392.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sater dan penarikan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku-buku yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

RI
SUHAHABIL NAZARA
NIP. 197011231990031005

Gambar 27. DIPA Awal Dirjen Perumahan Perdesaan TA 2025

2. DIPA Akhir

DIPA Akhir Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Dirjen Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025, dengan pagu awal sebesar Rp22.639.507.000 yang dikeluarkan pada 24 November 2025.


 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691496/2025

Revisi ke 07

Tanggal : 24 November 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (04) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN |
| 3. Provinsi | : (10) | JAMBI |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691496) | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi |
| Sebesar | : Rp. 22.639.507.000 | (DUA PULUH DUA MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBLAN JUTA LIMA RATUS TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

00.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.04.01.01 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	22.639.507.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

 Jumlah Uang
 Rp. 22.639.507.000
 Rp. 22.639.507.000

D. Pencatatan dana dilakukan melalui :

1. KPPN J A M B I (012) Rp. 22.639.507.000

E. Pernyataan Syant dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

 Jakarta, 02 Desember 2024
 A/N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

Gambar 28. DIPA Akhir Dirjen Perumahan Perdesaan TA 2025

3. Kronologi Revisi DIPA

DIPA pada Dirjen Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 6 (enam) kali, meliputi:

- a. Revisi DIPA ke-1 pada bulan Mei terkait revisi pengurangan anggaran semula Rp13.411.392.000 menjadi Rp22.409.000.
- b. Revisi DIPA ke-2 pada bulan Juli terkait revisi penambahan anggaran semula Rp22.409.000 menjadi Rp107.519.000.
- c. Revisi DIPA ke-3 pada bulan Agustus terkait revisi POK DIPA, sehingga anggaran tetap sama Rp107.519.000.
- d. Revisi DIPA ke-4 pada bulan Agustus terkait revisi penambahan anggaran semula Rp107.519.000 menjadi Rp23.325.451.000.
- e. Revisi DIPA ke-5 pada bulan September terkait revisi POK DIPA, sehingga anggaran tetap sama Rp23.325.451.000.

- f. Revisi DIPA ke-6 pada bulan Oktober terkait terkait revisi penambahan anggaran semula Rp23.325.451.000 menjadi Rp22.639.507.000.

2.4.4 DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan

DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Dirjen Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 dengan pagu awal sebesar Rp5.615.284.000 yang dikeluarkan pada 02 Desember 2024.

1. DIPA Awal

DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Dirjen Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025, dengan pagu awal sebesar Rp5.615.284.000 yang dikeluarkan pada 02 Desember 2024.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691550/2025



DIG-1001-1009-7509-6659

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

B. Dengan ini disahkan Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	
3. Provinsi	: (10)	JAMBI	
4. Kode Nama Satker	: (691550)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	
Sebesar	: Rp.	5.615.284.000	(LIMA MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.		Jumlah Utang
146.05.1A.7061 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.		5.615.284.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rujukan Murni	Rp.	5.615.284.000	Rp.	0
2. PNB	Rp.		Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Rp.	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPKN J A M B I (012) Rp. 5.615.284.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penerimaan Dana dan Penerimaan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman ini DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

Gambar 29. DIPA Awal Dirjen Perumahan Perkotaan TA 2025

2. DIPA Akhir

DIPA Akhir Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada Dirjen Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025, dengan pagu awal sebesar Rp6.667.441.000 yang dikeluarkan pada 25 November 2025.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691550/2025



05-9088-3301-0310-4330

Revisi ke 08
 Tanggal : 25 November 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

B. Dengan ini disahkan Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (10)	JAMBI
4. Kode/Nama Satker	: (691550)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Sebesar	: Rp.	6.667.441.000 (ENAM MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Unit kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

05 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

05.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.05.01.001 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

C. Sumber Dana Berasal dari :		
1. Rupiah Murni	Rp.	6.667.441.000
2. PINBP	Rp.	0
- PINBP TA Berjalan	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBBN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN : J A M B I (012) Rp. 6.667.441.000

E. Pernyataan Synd dan Keterangan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Perencanaan yang tercantum dalam halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271990031002

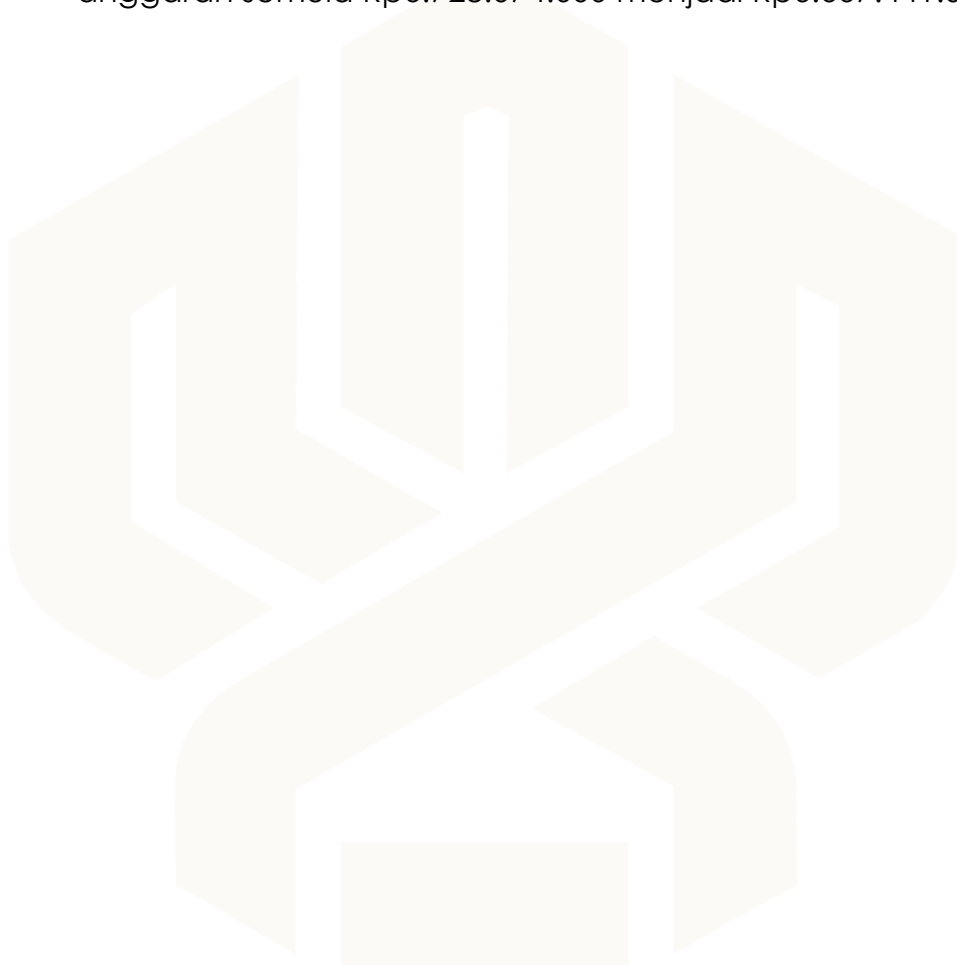
Gambar 30. DIPA Akhir Dirjen Perumahan Perkotaan TA 2025

3. Kronologi Revisi DIPA

DIPA pada Dirjen Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 7 (tujuh) kali, meliputi:

- a. Revisi DIPA ke-1 pada bulan Mei terkait revisi pengurangan anggaran semula Rp5.615.284.000 menjadi Rp20.000.000.
- b. Revisi DIPA ke-2 pada bulan Juli terkait revisi penambahan anggaran semula Rp20.000.000 menjadi Rp104.421.000.
- c. Revisi DIPA ke-3 pada bulan Agustus terkait revisi penambahan anggaran semula Rp104.421.000 menjadi Rp526.400.000.
- d. Revisi DIPA ke-4 pada bulan Agustus terkait revisi penambahan anggaran semula Rp526.400.000 menjadi Rp5.375.843.000.

- e. Revisi DIPA ke-5 pada bulan September terkait revisi POK DIPA, sehingga anggaran tetap sama Rp5.375.843.000.
- f. Revisi DIPA ke-6 pada bulan Oktober terkait revisi penambahan anggaran semula Rp5.375.843.000 menjadi Rp6.728.074.000.
- g. Revisi DIPA ke-7 pada bulan Oktober terkait revisi penambahan anggaran semula Rp6.728.074.000 menjadi Rp6.667.441.000.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan langkah krusial dalam menciptakan sistem pemerintahan atau organisasi yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Untuk itu, berbagai upaya perlu dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan agar akuntabilitas tidak hanya menjadi sebuah tuntutan formal, melainkan menjadi budaya yang diterapkan dalam setiap lini organisasi. Upaya peningkatan akuntabilitas kerja dilakukan dalam beberapa tahapan berikut diantaranya:

3.1.1 Perencanaan Kinerja

Tahap pertama dari Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja adalah perencanaan kinerja. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi memiliki target perencanaan kinerja tahun 2025 berdasarkan 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang meliputi:

- a. Sekretariat Jenderal
 - i. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen
- b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 - i. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman
- c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
 - i. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
 - ii. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan

- iii. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan

d. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

- i. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan
- ii. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan

3.1.2 Pengukuran Kinerja

Tahap kedua dari Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi menggunakan metode perhitungan kinerja berdasarkan perbandingan persentase anggaran. Detail metode pengukuran kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 pada 4 DIPA adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal

Table 6

No	Delineasi	Pagu (Rp)	Progres Keuangan (Rp)	Bobot Pengukuran Kinerja	
				DIPA (%)	Realisasi (%)
	Dipa Sekjen (01691388)	648.237.000	562.587.355	100	86,79
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	358.187.000	336.181.815	55,26	51,86
2	Langganan Daya dan Jasa	62.000.000	27.089.540	9,56	4,18
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	51.730.000	28.386.000	7,98	4,38
4	Honor Pengelola Keuangan	176.320.000	170.930.000	27,2	26,37

b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Delineasi	Pagu (Rp)	Progres Keuangan (Rp)	Bobot Pengukuran Kinerja	
				DIPA (%)	Realisasi (%)
	Dipa Kawasan Permukiman (03691442)	6.031.148.000	5.894.486.517	100	97,73

1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas	81.114.000	46.646.906	1,34	0,77
2	Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah	5.360.000.000	5.360.000.000	88,87	88,87
3	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Rumah	590.034.000	487.839.611	9,78	8,09

c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Delineasi	Pagu (Rp)	Progres Keuangan (Rp)	Bobot Pengukuran Kinerja	
				DIPA (%)	Realisasi (%)
	Dipa Perkotaan (05691550)	6.667.441.000	6.405.605.490	100	96,07
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	506.400.000	323.145.363	7,6	4,85
2	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	4.380.000.000	4.380.000.000	65,69	65,69
3	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah	428.810.000	355.108.000	6,43	5,33
4	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun MA	150.000.000	148.556.000	2,25	2,23
5	Pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi	1.098.900.000	1.098.900.000	16,48	16,48
6	MK Pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi	74.360.000	74.360.000	1,12	1,12
7	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rusun MA RI Jambi	28.971.000	25.536.127	0,43	0,38

d. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Delineasi	Pagu (Rp)	Progres Keuangan (Rp)	Bobot Pengukuran Kinerja	
				DIPA (%)	Realisasi (%)
	Dipa Perdesaan (04691496)	22.639.507.000	22.418.548.160	100	99,02
1	Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	107.519.000	75.335.660	0,47	0,33
2	Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	20.800.000.000	20.740.000.000	91,87	91,61
3	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1.597.036.000	1.513.768.300	7,05	6,69
4	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan	134.952.000	89.444.200	0,6	0,4

3.1.3 Pelaporan Kinerja

Tahap ketiga dari Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja adalah pelaporan kinerja. Laporan kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 meliputi 4 Laporan kinerja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 35,986,333,000, dan total realisasi sebesar Rp. 35,281,227,522, dan capaian progress sebesar 98,04% - Per 05 Januari 2026. Adapun rincian dari masing masing DIPA adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal

Total pagu DIPA Sekretariat Jenderal yang diberikan ke Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 648,237,000, dan total realisasi sebesar Rp. 562,587,355, dan capaian progress sebesar 86,79% - Per 05 Januari 2026. Adapun detail pelaporan kinerja terdapat pada tabel berikut:

Table 7. Pelaporan Kinerja Sekretariat Jenderal

No	Delineasi	Pagu (Rp)	Progres Keuangan	
			Rp	%
	Dipa Sekjen (01691388)	648.237.000	562.587.355	86.79%
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	358.187.000	336.181.815	93.86%
2	Langganan Daya dan Jasa	62.000.000	27.089.540	43.69%
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	51.730.000	28.386.000	54.87%
4	Honor Pengelola Keuangan	176.320.000	170.930.000	96.94%

b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Total pagu DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang diberikan ke Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 6,667,441,000, dan total realisasi sebesar Rp. 6,405,605,490, dan capaian progress sebesar 96,07% - Per 05 Januari 2026. Adapun detail pelaporan kinerja terdapat pada tabel berikut:

Table 8. Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Delineasi	Pagu (Rp)	Progres Keuangan		Progress Fisik	
			Rp	%	Target(%)	Realisasi(%)
	Dipa Kawasan Permukiman (03691442)	6.031.148.000	5.894.486.517	97.73%	100	98.28
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas	81.114.000	46.646.906	57.51%	100	98.28
2	Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah	5.360.000.000	5.360.000.000	100%		
3	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Rumah	590.034.000	487.839.611	82.68%		

c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Total pagu DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang diberikan ke Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 6,031,148,000, dan total realisasi sebesar Rp. 5,894,486,517, dan capaian progress sebesar 97,73% - Per 05 Januari 2026. Adapun detail pelaporan kinerja terdapat pada tabel berikut:

Table 9. Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Delineasi	Pagu (Rp)	Progres Keuangan		Progress Fisik	
			Rp	%	Target(%)	Realisasi(%)
	Dipa Perkotaan (05691550)	6.667.441.000	6.405.605.490	96.07%	100	99.97
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	506.400.000	323.145.363	63.81%	100	99.97
2	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	4.380.000.000	4.380.000.000	100%		
3	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah	428.810.000	355.108.000	82.81%		
4	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun MA	150.000.000	148.556.000	99.04%	-	-
5	Pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi	1.098.900.000	1.098.900.000	100%	-	-
6	MK Pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi	74.360.000	74.360.000	100%	-	-
7	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rusun MA RI Jambi	28.971.000	25.536.127	88.14%	-	-

d. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Total pagu DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang diberikan ke Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 22,639,507,000, dan total realisasi sebesar Rp. 22,418,548,160, dan capaian progress sebesar 99,02% - Per 05 Januari 2026. Adapun detail pelaporan kinerja terdapat pada tabel berikut:

Table 10. Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Delineasi	Pagu (Rp)	Progres Keuangan		Progress Fisik	
			Rp	%	Target(%)	Realisasi(%)
	Dipa Perdesaan (04691496)	22.639.507.000	22.418.548.160	99.02%	100	97.13
1	Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	107.519.000	75.335.660	70.07%	100	97.13
2	Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	20.800.000.000	20.740.000.000	99.71%		
3	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1.597.036.000	1.513.768.300	94.79%		

3.1.4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tahap keempat dari Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja adalah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan hasil sebagai berikut:

- Daya Listrik pada Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mencukupi kebutuhan, sehingga sering drop
- Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat

- c. Terdapat beberapa Penerima Bantuan (PB) BSPS Provinsi Jambi yang mengundurkan diri secara resmi dikarenakan ketidakanggupan mengikuti aturan juknis BSPS ataupun mengundurkan diri pada pertengahan hingga akhir pelaksanaan BSPS
- d. Terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan BSPS Provinsi Jambi seperti bencana alam banjir, jalan rusak yang ditutup total, dan kendala kendala lainnya yang menyebabkan pengerjaan dan pelaksanaan BSPS Provinsi Jambi mengalami keterlambatan

3.2 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu unit kerja atau pimpinan suatu organisasi dalam mempertanggung jawabkan dan menjelaskan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam kurun waktu satu tahun. Secara keseluruhan, ikhtisar capaian kinerja Satker PKP Provinsi Jambi dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini:

Table 11. Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sekretariat Jenderal				
A. Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan	1 Layanan	100%
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
B. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100%

	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	268 Unit	268 Unit	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
C. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
D. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1040 Unit	1037 Unit	99.69%
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
E. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
F. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 Unit	0 Unit	0%
G. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	219 Unit	219 Unit	100%

Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi berdasarkan anggaran keuangan sudah sangat baik dimana dari total PAGU sebesar Rp. 35,986,333,000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 35,281,227,522, dan persentasi progress

capaian 98.04% dengan sisa Rp. 705,105,478. Adapun berdasarkan kegiatan fisik capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi adalah 97,74% Per 05 Januari 2026. Adapun perbandingan capaian kinerja target per Kegiatan berdasarkan Renstra, DIPA dan PK adalah sebagai berikut:

Table 12. Perbandingan Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Jambi dengan Renstra dan PK

No	Jenis Program / Kegiatan	Target Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029	Target Tahun 2025 Berdasarkan DIPA dan PK	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Jumlah Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
3	Jumlah Rumah Swadaya	958 Unit	1527 Unit	1524 Unit
4	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/Polri	16 Unit	1 Unit	0 Unit

Dimana capaian kinerja tahun 2025 terdapat 2 yang tidak memenuhi target, yaitu Jumlah Rumah Swadaya yang hanya tercapai 1524 Unit dari target 1527 berdasarkan DIPA dan PK dan 958 Unit berdasarkan Renstra. Program/Kegiatan lainnya yaitu Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/Polri yang belum ada tercapai (0 Unit), karena program Rumah Susun ini adalah program Multi Years Contract (MYC) yang ditargetkan selesai pada tahun 2026.

3.2.1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

Pelaksanaan Program Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen telah mencapai realisasi fisik sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh terlaksananya empat aktivitas utama yang menjadi tulang punggung operasional Satker, yaitu:

1. **Operasional dan Pemeliharaan Kantor:** Menjamin keberlangsungan aktivitas perkantoran sehari-hari.
2. **Langganan Daya dan Jasa:** Pemenuhan kebutuhan listrik dan internet yang stabil.

3. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana:** Perawatan aset negara agar tetap berfungsi optimal.
4. **Honor Pengelola Keuangan:** Pembayaran hak keuangan bagi petugas pengelola anggaran tepat waktu.

3.2.2 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko nomor 04/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, Bantuan pembangunan rumah swadaya merupakan program bantuan dan layanan rumah swadaya bagi masyarakat untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berdasarkan kegotong-royongan.

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Jambi Tahun 2025 menjangkau wilayah yang luas guna memastikan pemerataan pembangunan. Kegiatan fisik tersebar di **11 Kabupaten/Kota** yang mencakup **1.527 unit** rumah tidak layak huni. Fokus penanganan dibagi ke dalam tiga deliniasi kawasan strategis:

1. **Kawasan Pesisir:** Terpusat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan alokasi 268 unit yang tersebar di 10 Kecamatan dan 33 Desa.
2. **Kawasan Perkotaan:** Menyasar Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh dengan total alokasi 219 unit di 12 Kecamatan dan 22 Desa/Kelurahan.
3. **Kawasan Perdesaan:** Merupakan porsi terbesar dengan total 1.040 unit yang tersebar di 8 Kabupaten (Batanghari, Bungo,

Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo) mencakup 37 Kecamatan dan 84 Desa.

Realisasi fisik di lapangan menunjukkan angka **1.523 unit** tertangani dari target 1.527 unit. Terdapat selisih kecil (4 unit) yang disebabkan oleh dinamika lapangan seperti pengunduran diri penerima bantuan atau kendala teknis yang tidak memungkinkan pelaksanaan konstruksi. Berikut tabel lokasi kegiatan BSPS Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Jambi :

Table 13. Rekapitulasi Pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi

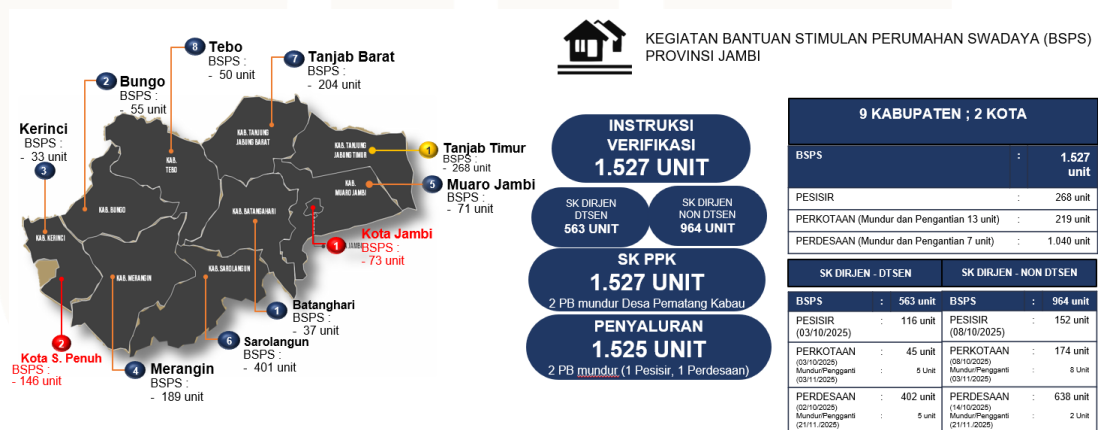
NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	ALOKASI / SK DIRJEN	SK PPK	REALISASI
		(JUMLAH)	(JUMLAH)	(UNIT)	(UNIT)	(UNIT)
I	KAWASAN PESISIR	10	33	268	268	268
1	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	10	33	268	268	268
II	KAWASAN PERKOTAAN	12	22	219	219	219
1	KOTA JAMBI	4	6	73	73	73
2	KOTA SUNGAI PENUH	8	16	146	146	146
III	KAWASAN PERDESAAN	37	84	1.040	1.040	1.037
1	KAB. BATANGHARI	2	5	37	37	37
2	KAB. BUNGO	3	3	55	55	55
3	KAB. KERINCI	2	6	33	33	33
4	KAB. MERANGIN	7	12	189	189	189
5	KAB. MUARO JAMBI	6	9	71	71	71
6	KAB. SAROLANGUN	6	21	401	401	399
7	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	8	23	204	204	204
8	KAB. TEBO	3	5	50	50	49
TOTAL				1527	1527	1524

Untuk memberikan gambaran visual mengenai distribusi program, **Peta Sebaran Kegiatan BSPS** di atas mengilustrasikan titik-titik lokasi penerima bantuan di seluruh Provinsi Jambi. Secara administratif, proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan telah dilaksanakan secara tertib melalui tahapan berikut:

1. **Instruksi Verifikasi:** Dilakukan terhadap 1.527 unit calon penerima.

2. **Penetapan SK Dirjen:** Terbagi menjadi dua tahap, yaitu SK Dirjen Tahap I (DTSEN) sebanyak 563 unit dan SK Dirjen Tahap II (Non-DTSEN) sebanyak 964 unit.
3. **Penyaluran Dana:** Berhasil disalurkan kepada 1.525 unit penerima bantuan. Terdapat catatan 2 unit Penerima Bantuan (PB) yang mundur (1 di Pesisir dan 1 di Perdesaan), yang menunjukkan ketatnya proses validasi di lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran

Visualisasi detail pelaksanaan di masing-masing kawasan dapat dilihat pada dokumentasi berikut:



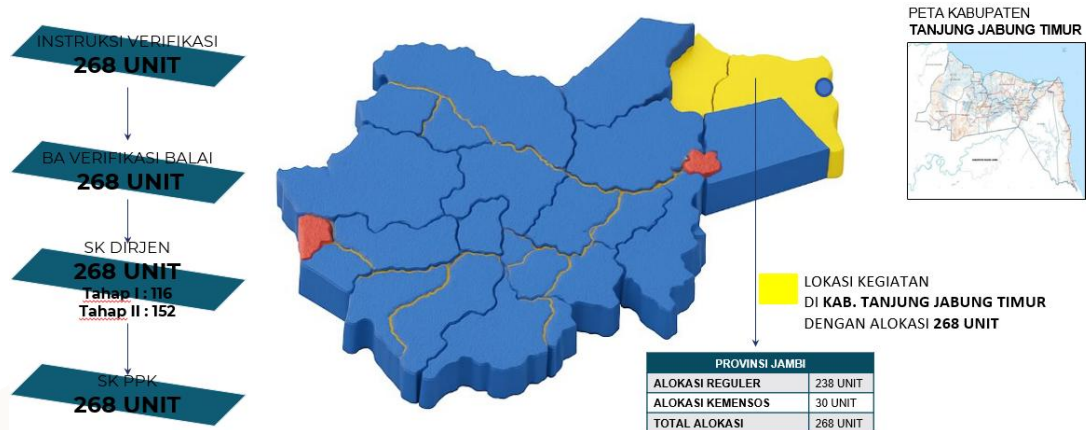
Gambar 31. Rangkuman Pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi

A. Deliniasi Kawasan Pesisir

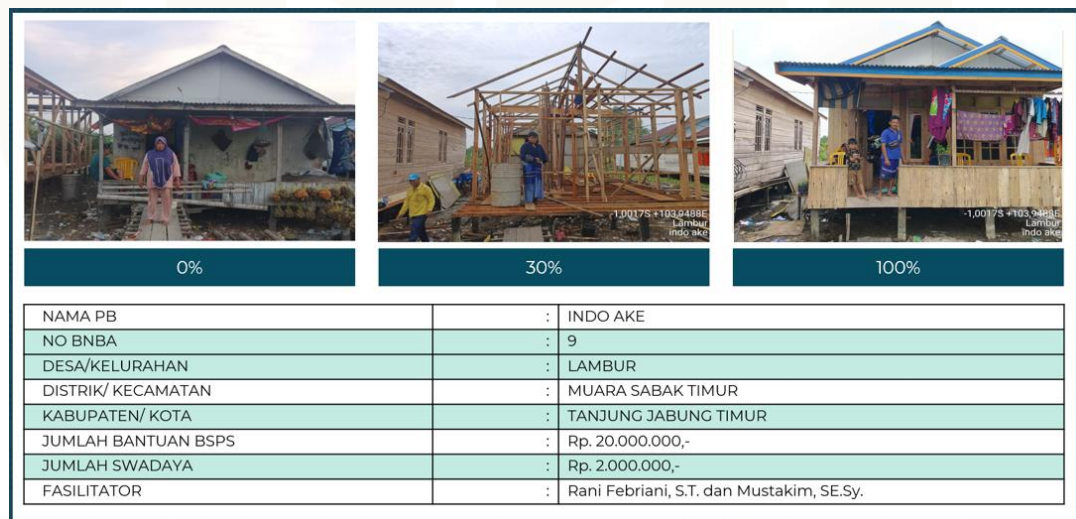
Deliniasi Kawasan Pesisir memiliki total 268 unit BSPS, yang seluruhnya berfokus pada wilayah Tanjung Jabung Timur. Gambar – gambar di bawah menampilkan transformasi rumah warga di kawasan pasang surut. Sebagai sampel, Penerima Bantuan (PB) a.n. Indo Ake (Desa Lambur) dan Ridwan Nasution menunjukkan progres pembangunan rumah panggung kayu.

1. Kondisi 0%: Rumah awal berupa gubuk kayu yang lapuk dan rawan roboh diterpa air pasang.
2. Kondisi 30%: Kerangka rumah baru telah berdiri kokoh menggunakan material kayu berkualitas.

3. Kondisi 100%: Terwujudnya rumah panggung layak huni yang aman dari pasang air laut, lengkap dengan atap seng, dinding papan rapi, dan lantai yang kuat.



Gambar 32. Peta Lokasi BSPS Kawasan Pesisir



Gambar 33. Progres BSPS di Kawasan Pesisir 1

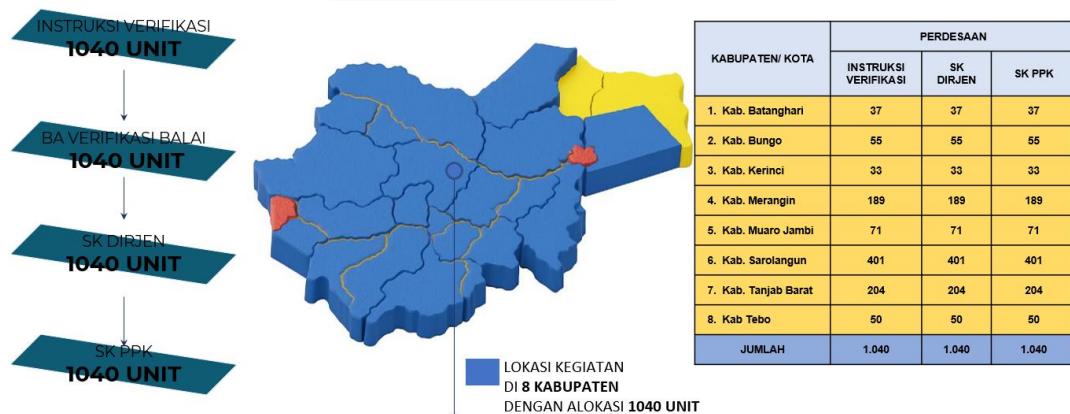


Gambar 34. Progres BSPS di Kawasan Pesisir 2

B. Deliniasi Perdesaan

Deliniasi Perdesaan memiliki total 1040 unit BSPS dengan 8 Kabupaten. Pada kawasan perdesaan, sampel dokumentasi diambil dari PB a.n. M. Yusfik (Desa Tungkal I) dan Nurma (Desa Tungkal II).

1. Foto progres memperlihatkan penggantian total struktur rumah yang sebelumnya tidak memenuhi standar keselamatan.
2. Hasil akhir (100%) menunjukkan rumah dengan ventilasi dan pencahayaan yang memadai, serta struktur bangunan yang jauh lebih stabil dibandingkan kondisi awal (0%) yang memprihatinkan.



Gambar 35. Peta Lokasi BSPS Perdesaan



NAMA PB	: M.YUSFIK
NO BNBA	: 3
DESA/KELURAHAN	: TUNGKAL I
DISTRIK/ KECAMATAN	: TUNGKAL ILIR
KABUPATEN/ KOTA	: TANJUNG JABUNG BARAT
JUMLAH BANTUAN BSPS	: Rp. 20.000.000,-
JUMLAH SWADAYA	: Rp. 2.000.000,-
FASILITATOR	: Hendriyanto, S.T. dan Ratna Dewi, SH

Gambar 36. Progres BSPS di Perdesaan 1



NAMA PB	: JUARIYAH
NO BNBA	: 9
DESA/KELURAHAN	: TUNGKAL I
DISTRIK/ KECAMATAN	: TUNGKAL ILIR
KABUPATEN/ KOTA	: TANJUNG JABUNG BARAT
JUMLAH BANTUAN BSPS	: Rp. 20.000.000,-
JUMLAH SWADAYA	: Rp. 2.000.000,-
FASILITATOR	: Hendriyanto, S.T. dan Ratna Dewi, SH

Gambar 37. Progres BSPS di Perdesaan 2



NAMA PB	: NURMA
NO BNBA	: 8
DESA/KELURAHAN	: TUNGKAL II
DISTRIK/ KECAMATAN	: TUNGKAL ILIR
KABUPATEN/ KOTA	: TANJUNG JABUNG BARAT
JUMLAH BANTUAN BSPS	: Rp. 20.000.000,-
JUMLAH SWADAYA	: Rp. 2.000.000,-
FASILITATOR	: Hendriyanto, S.T. dan Ratna Dewi, SH

Gambar 38. Progres BSPS di Perdesaan 3

C. Deliniasi Perkotaan

Deliniasi Perkotaan memiliki total 219 unit BSPS dengan 2 Kota. Di wilayah perkotaan yang padat, peningkatan kualitas rumah tetap memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Sampel dokumentasi dari PB a.n. **Rabisah, Gamo**, dan **Heri Antoni** (Kecamatan Pesisir Bukit) memperlihatkan perbaikan komponen Aladin (Atap, Lantai, Dinding). Rumah yang sebelumnya berdinding papan seadanya dan berlantai tanah/semen rusak, kini telah bertransformasi menjadi hunian semi-permanen atau permanen yang sehat dan layak huni, meningkatkan taraf hidup penerima bantuan di lingkungan perkotaan.



Gambar 39. Peta Lokasi BSPS Perkotaan



NAMA PB	: RABISAH
NO BNBA	: 152
DESA/KELURAHAN	: KOTA BENTO
DISTRIK/ KECAMATAN	: PESISIR BUKIT
KABUPATEN/ KOTA	: SUNGAI PENUH
JUMLAH BANTUAN BSPS	: Rp. 20.000.000,-
JUMLAH SWADAYA	: Rp. 2.000.000,-
FASILITATOR	: Gita Rusady, S.T. dan Novi Gustiar, S.E.

Gambar 40. Progres BSPS di Perkotaan 1



NAMA PB	: GAMO
NO BNBA	: 160
DESA/KELURAHAN	: KOTA BENTO
DISTRIK/ KECAMATAN	: PESISIR BUKIT
KABUPATEN/ KOTA	: SUNGAI PENUH
JUMLAH BANTUAN BSPS	: Rp. 20.000.000,-
JUMLAH SWADAYA	: Rp. 2.000.000,-
FASILITATOR	: Gita Rusady, S.T. dan Novi Gustiar, S.E.

Gambar 41. Progres BSPS di Perkotaan 2



NAMA PB	: HERI ANTONI
NO BNBA	: 165
DESA/KELURAHAN	: KOTA KERAS
DISTRIK/ KECAMATAN	: PESISIR BUKIT
KABUPATEN/ KOTA	: SUNGAI PENUH
JUMLAH BANTUAN BSPS	: Rp. 20.000.000,-
JUMLAH SWADAYA	: Rp. 2.000.000,-
FASILITATOR	: Gita Rusady, S.T. dan Novi Gustiar, S.E.

Gambar 42. Progres BSPS di Perkotaan 3

3.2.3 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni

Pada output Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni, khususnya untuk Pembangunan Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI di Perkotaan, kegiatan ini difokuskan pada penyelesaian tahap pra-konstruksi, administrasi kontrak, dan pekerjaan persiapan lahan (*land clearing*). Berikut adalah capaian progresif yang telah dilaksanakan:

1. Penyiapan Lahan (Land Clearing): Sebagaimana terlihat pada, pembersihan lahan telah dilaksanakan secara menyeluruh. Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Susun kini dalam kondisi siap bangun (*ready for construction*), bebas dari vegetasi liar, dan telah dilakukan pengukuran batas.
2. Penandatanganan Kontrak (Contract Signing): Kepastian hukum dan administratif pelaksanaan proyek telah terwujud melalui penandatanganan kontrak kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan penyedia jasa.
3. Penandatanganan Kontrak Manajemen Konstruksi (MK) dilakukan bersama PT. Alocita Mandiri.
4. Penandatanganan Kontrak Fisik Konstruksi dilakukan bersama CV. Riau Andalan Utama
5. Koordinasi Teknis (PMC): Telah dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Project Management Consultant (PMC) untuk Pembangunan Rumah Susun MA Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi teknis, meninjau jadwal pelaksanaan (*S-Curve*), dan memitigasi risiko konstruksi agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu.
6. Serah Terima Lahan: Proses serah terima lahan di lokasi pembangunan telah dilakukan bersama para pemangku

kepentingan, memastikan tidak ada sengketa lahan yang dapat menghambat jalannya pembangunan fisik ke depannya.

Meskipun progres fisik konstruksi bangunan gedung belum terlihat signifikan secara vertikal karena baru memasuki tahap awal kontrak di akhir tahun, namun tahapan krusial dalam persiapan dan legalitas kontrak telah terpenuhi 100% sesuai target.



Gambar 43. Lokasi Rusun dari atas setelah pembersihan lahan



Gambar 44. TTD Kontrak MK PT. Alocita Mandiri



Gambar 45. TTD Kotrak Fisik CV. Riau Andalan Utama



Gambar 46. Pelaksanaan Project Management Consultant (PMC) pada Pembangunan Rumah Susun MA Jambi

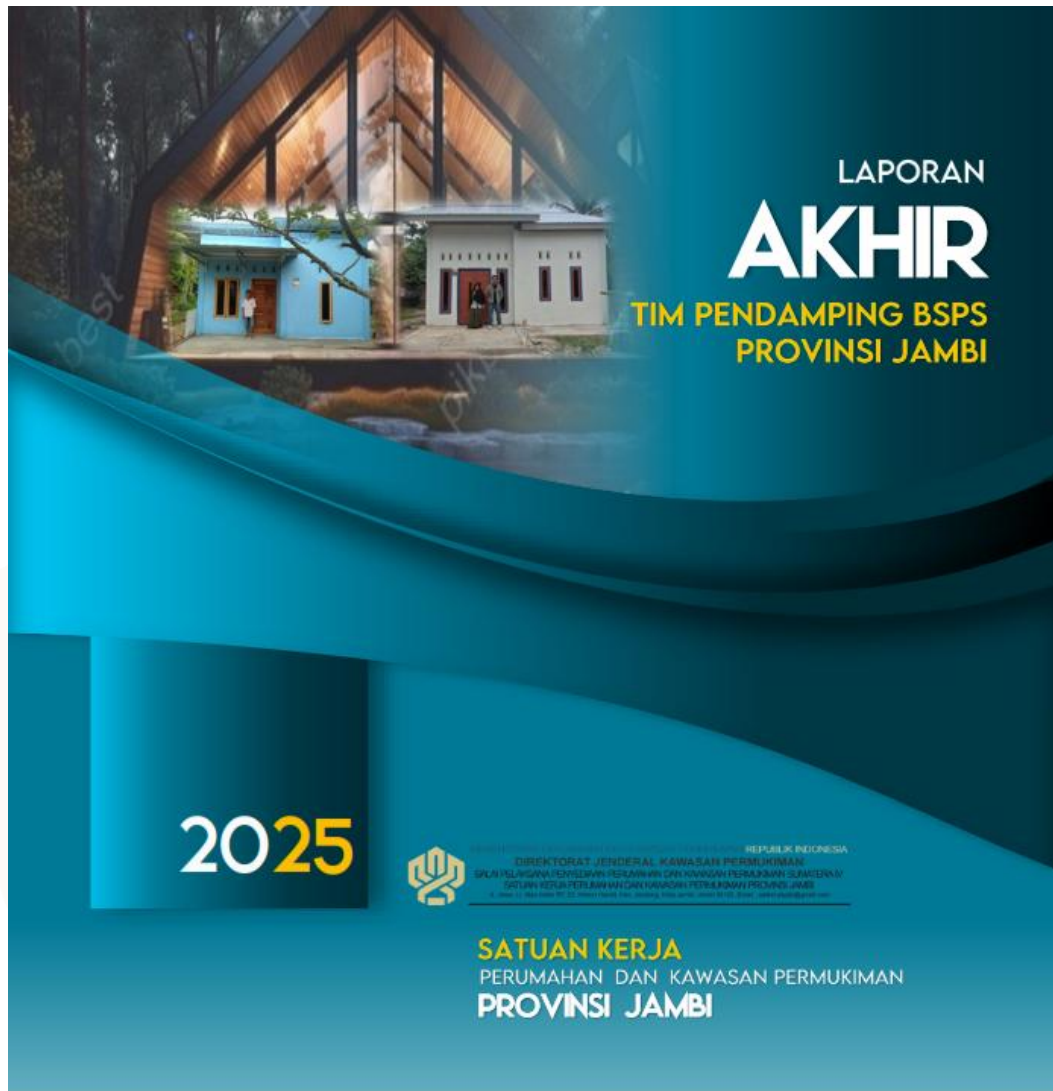


Gambar 47. Penyerahan Lahan Pembangunan Rusun MA Jambi

3.2.4 Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Pembangunan Perumahan

Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi kinerja, Satker PKP Provinsi Jambi telah menyelesaikan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi secara tepat waktu. Output berupa Laporan Akhir Tim Pendamping BSPS Provinsi Jambi Tahun 2025 telah diselesaikan dan didokumentasikan.

Dokumen ini merekam seluruh jejak pelaksanaan kegiatan, mulai dari verifikasi calon penerima bantuan, pelaksanaan konstruksi, hingga pelaporan dana. Laporan ini menjadi instrumen vital dalam mengukur keberhasilan outcome program serta menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya.



Gambar 48. Laporan Akhir BSPS Provinsi Jambi TA 2025

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Tahun 2025 dengan kinerja tahun tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 14. Analisis Perbandingan Kinerja Satker PKP Provinsi Jambi

Realisasi Fisik (%)			Realisasi Keuangan (%)		
2023	2024	2025	2023	2024	2025
100	100	97,74	99,17	99,37	98,04

Berdasarkan data perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jambi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik pada tahun anggaran 2025 menurun dibanding tahun anggaran 2024 dikarenakan pelaksanaan penyerapan anggaran pada tahun 2025 baru berjalan efektif pada bulan Juli 2025.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Table 15. Analisis Realisasi Anggaran

No	Delineasi	Pagu (Rp)	Progres Keuangan	
			Rp	%
	TOTAL	35.986.333.000	35.281.227.522	98.04%
	Dipa Sekjen (01691388)	648.237.000	562.587.355	86.79%
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	358.187.000	336.181.815	93.86%
2	Langganan Daya dan Jasa	62.000.000	27.089.540	43.69%
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	51.730.000	28.386.000	54.87%
4	Honor Pengelola Keuangan	176.320.000	170.930.000	96.94%
	Dipa Kawasan Permukiman (03691442)	6.031.148.000	5.894.486.517	97.73%
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas	81.114.000	46.646.906	57.51%
2	Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah	5.360.000.000	5.360.000.000	100%
3	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Rumah	590.034.000	487.839.611	82.68%
	Dipa Perdesaan (04691496)	22.639.507.000	22.418.548.160	99.02%

1	Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	107.519.000	75.335.660	70.07%
2	Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	20.800.000.000	20.740.000.000	99.71%
3	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1.597.036.000	1.513.768.300	94.79%
4	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan	134.952.000	89.444.200	66.28%
	Dipa Perkotaan (05691550)	6.667.441.000	6.405.605.490	96.07%
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	506.400.000	323.145.363	63.81%
2	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	4.380.000.000	4.380.000.000	100%
3	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah	428.810.000	355.108.000	82.81%
4	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun MA	150.000.000	148.556.000	99.04%
5	Pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi	1.098.900.000	1.098.900.000	100%
6	MK Pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi	74.360.000	74.360.000	100%
7	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rusun MA RI Jambi	28.971.000	25.536.127	88.14%

Berdasarkan tabel Table 15, realisasi anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 adalah 98.04% per tanggal 05 Januari 2025. Beberapa kendala pada realisasi anggaran diantaranya:

a. DIPA Sekretariat Jenderal

- i. Operasional dan Pemeliharaan Kantor hanya terealisasi 93.86%, dikarenakan beberapa kegiatan belum optimal salah satunya adalah Snack Rapat Biasa yang hanya terealisasi 62,15%
- ii. Langganan Daya dan Jasa hanya terealisasi 43.69%, dikarenakan kegiatan langganan daya dan jasa yang dianggarkan untuk 1 tahun, namun satker PKP Provinsi Jambi beroperasi optimal sejak bulan Juni 2025 sehingga anggaran

kegiatan seperti Langganan Listrik hanya terpakai 41.19%, Langganan Internet hanya terpakai 49.13%, dan Langganan Air PAM yang tidak terpakai sama sekali.

iii. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana hanya terealisasi 54.87% dikarenakan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin hanya terpakai 37.72%

b. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

i. Realisasi anggaran ketiga DIPA diatas mengalami kendala yang sama yaitu, kurangnya realisasi anggaran untuk kegiatan: a). Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, b). Pengawasan dan Pengendalian, dan c). Monitoring dan Evaluasi.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan faktor kunci dalam pencapaian target kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Dalam konteks penyediaan perumahan, baik itu melalui program rumah swadaya, rumah susun, atau program perumahan lainnya, pengelolaan sumber daya yang baik sangat mempengaruhi hasil yang dicapai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, material, anggaran, serta teknologi yang digunakan dalam setiap tahapan pembangunan perumahan.

3.5.1 Sumber Daya Manusia

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Jambi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 16. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pegawai			Rasio Penugasan / Orang
			ASN	KI/TA/Non PNS	Jumlah	
1	Perencanaan dan Pengendalian	7	10	0	10	3,5
2	Ruswa dan RUK	7	8	2	10	3,5
3	Rusun dan Rusus	4	6	0	6	3,34
Jumlah		6	24	2	26	10,34

Rumus Rasio Penugasan = $(5/\text{Jumlah Orang}) \times \text{Jumlah Kegiatan}$. Jika diasumsikan setiap kegiatan dikerjakan oleh 5 (lima) orang dalam satu tim maka rata-rata rasio penugasan yaitu 3 tugas tanggung jawab. Agar beban kerja lebih seimbang antar unit perlu dilakukan redistribusi jumlah pegawai atau penambahan jumlah pegawai berstatus ASN agar terjadi keseimbangan.

3.5.2 Analisis Efisiensi Penilaian Kinerja Pegawai

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung kepada sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya non manusia (non-human resources). Dari pengelompokan sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor paling dominan. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus anggota dalam organisasi dengan masing - masing peran dan fungsinya tersendiri. Keberhasilan organisasi mencapai tujuan dalam berbagai sarannya serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal maupun internal, sangat

ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan tepat.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Penilaian Kinerja ASN bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbunyi "Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan". Dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja ASN yang terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi secara berkala diperlukan untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik. Pentingnya kinerja sumber daya manusia dalam menciptakan organisasi yang berkinerja tinggi, dalam menunjang pelaksanaan Visi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV.

3.5.3 Analisis Efisiensi Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan terdapat rangkaian proses mulai dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan yang mana monitoring dan evaluasi berperan dalam setiap tahapannya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan secara efektif. Dalam mewujudkan efektivitas, absolut, terkini, akuntabel. Seluruh kegiatan yang diemban oleh Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi perlu adanya alat bantu dalam proses pengerjaan kegiatan tersebut. Berikut adalah pemanfaatan aset serta aplikasi/website online yang digunakan untuk membuat (input), memperbaharui (updating), dan menghasilkan (outcome) laporan/informasi kegiatan yang dibutuhkan dan bisa digunakan untuk pertanggungjawaban anggaran, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Aset Intrakomptabel Atau Aset Tetap Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pencapaian maksud dan tujuan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi yaitu dukungan sarana dan prasarana baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak cukup banyak, dengan menggunakan hasil pengadaan yang telah dilakukan sejak tahun 2022 dimana barang-barang tersebut telah dicatat dalam pencatatatan BMN.
- b. Pemanfaatan Teknologi Berbasis Aplikasi/Website Online
 - i. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada.

Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis aktual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

- ii. Aplikasi Satu Anggaran Aplikasi SatuDJA adalah akronim dari Sistem Aplikasi Terpadu Anggaran Kementerian Keuangan RI yang yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan sistem aplikasi yang dihasilkan oleh DJA, sehingga diharapkan pegawai dan stakeholder DJA hanya perlu mengakses satu sistem aplikasi untuk menyelesaikan seluruh proses bisnis penganggaran. Satu DJA dibangun pada tiga platform sistem aplikasi, yaitu: aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis web, dan aplikasi berbasis mobile dengan tujuh sub sistem yang saling terintegrasi.
- iii. E-Monitoring E-Monitoring merupakan pemantauan dan pelaporan dengan penyampaian data secara elektronik (online) serta dapat dipantau secara terus menerus untuk penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian untuk meyakinkan bahwa prosedur berjalan sebagaimana mestinya. Data tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satker ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, kemudian Direktorat Jenderal Perumahan hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya

system e-Monitoring, pelaporan data progress pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan tepat.

- iv. E-SAKIP E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (ESAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Entitas Kinerja di lingkungan Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan entitas kinerja. Aplikasi E-SAKIP ini menampilkan informasi secara waktu sebenarnya (real time) meliputi: 1). RPJMN; 2). Rencana Strategis; 3) Rencana Kinerja; 4). Indikator Kinerja Utama; 5). Perjanjian Kinerja; 6). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7). Evaluasi Capaian Kinerja; 8). Hasil Evaluasi SAKIP; 9). Kinerja Individu; 10). Kebijakan dan Peraturan terkait SAKIP.

3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Pemanfaatan informasi yang terdapat dalam laporan kinerja merupakan elemen penting dalam mengelola dan meningkatkan efektivitas program atau kegiatan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi. Laporan kinerja yang disusun secara berkala mengandung data dan informasi yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang pencapaian kinerja, masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Pemanfaatan informasi ini secara maksimal dapat mendukung pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, dan perencanaan yang lebih baik di masa depan.

3.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

- a. SK Verifikasi Calon Penerima Bantuan kegiatan BSPS yang turun pada periode triwulan III sangat menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga potensi mengundurkan diri dan pembatalan sangat mungkin terjadi. Untuk mendukung keberhasilan kegiatan selanjutnya diharapkan SK Verifikasi Calon Penerima Bantuan dapat turun pada triwulan I atau II.
- b. Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat
- c. Terdapat beberapa Penerima Bantuan (PB) BSPS Provinsi Jambi yang mengundurkan diri secara resmi dikarenakan ketidakmampuan mengikuti aturan juknis BSPS ataupun mengundurkan diri pada pertengahan hingga akhir pelaksanaan BSPS
- d. Terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan BSPS Provinsi Jambi seperti bencana alam banjir, jalan rusak yang ditutup total, dan kendala kendala lainnya yang menyebabkan pengerjaan dan pelaksanaan BSPS Provinsi Jambi mengalami keterlambatan
- e. Anggaran Dana ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan Satker PKP Provinsi Jambi dalam satu tahun, namun Satker PKP Provinsi Jambi baru beroperasi secara optimal mulai bulan Juni 2025, sehingga realisasi anggaran masih belum optimal yaitu hanya 98.04%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah termuat pada Bab I-III, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. **Capaian Strategis Program 3 Juta Rumah:** Satker PKP Jambi telah berhasil melaksanakan tugas operasional sebagai ujung tombak Kementerian PKP di daerah dalam upaya peningkatan akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keberhasilan ini diukur pencapaian progres Fisik sebesar 97.74% dan progress keuangan sebesar 98.04%.
- b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan target Perjanjian Kinerja sebagai berikut:
 - i. Sekretariat Jenderal memiliki target 1 layanan perkantoran dengan realisasi progres keuangan sebesar 86.79 %;
 - ii. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memiliki target 1 laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan 268 unit rumah swadaya, yang ditangani dengan realisasi progres keuangan sebesar 97,73%;
 - iii. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan memiliki target 1 laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan 1040 unit rumah swadaya dengan realisasi progres keuangan sebesar 99,02%;
 - iv. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki 1 target laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta 219 unit rumah swadaya, dan 1 unit rumah susun dengan realisasi progres keuangan sebesar 96,07%.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan pada periode mendatang, Satker PKP Provinsi Jambi menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. **Percepatan Administrasi:** Melakukan koordinasi intensif dengan Balai P3KP Sumatera IV dan Pusat untuk mendorong penerbitan SK Verifikasi Calon Penerima Bantuan paling lambat pada Triwulan I atau II guna meminimalisir risiko pembatalan bantuan.
- b. **Optimalisasi Manajemen Aset:** Menyusun SOP percepatan penghunian dan serah terima aset yang melibatkan komitmen tertulis dari Pemerintah Daerah sejak tahap awal pembangunan untuk mencegah inefektivitas pemanfaatan aset.
- c. **Penguatan Verifikasi:** Meningkatkan pengawasan lapangan untuk memastikan rumah yang mendapatkan bantuan BSPS sepenuhnya memenuhi kriteria layak huni guna menghindari temuan audit di masa depan.

LAMPIRAN

1. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

1.1. DIPA Sekretariat Jenderal

- DIPA Awal



2025-01-146.01-691388-10-012-1-00.pdf

- DIPA Akhir



2025-01-146.01-691388-10-012-1-06.pdf

1.2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- DIPA Awal



2025-01-146.03-691442-10-012-1-00.pdf

- DIPA Akhir



2025-01-146.03-691442-10-012-1-03.pdf

1.3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

- DIPA Awal



2025-01-146.04-691496-10-012-1-00.pdf

- DIPA Akhir



2025-01-146.04-691496-10-012-1-07.pdf

1.4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

- DIPA Awal



2025-01-146.05-691550-10-012-1-00.pdf

- DIPA Akhir



2025-01-146.05-691550-10-012-1-08.pdf

2. Lampiran Perjanjian Kerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

2.1. PK Sekretariat Jenderal



20260108_PK Satker PKP Jambi TA 2025_Sekjen.pdf

2.2. PK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



20260108_PK Satker PKP Jambi TA 2025_KP.pdf

2.3. PK Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



20260108_PK Satker PKP Jambi TA 2025_Kota.pdf

2.4. PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



20260108_PK Satker PKP Jambi TA 2025_Desa.pdf

3. Lampiran Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2025

3.1. Kawasan Permukiman

- PROFIL BSPS 2025 - KAMPUNG LAUT

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN : KUALA JAMBI
KELURAHAN/DESA : KAMPUNG LAUT
NO. SK PPK : 47/KPTS/Rb4.5.2/2025

Nomor BNBA	: 1	Nama KPB	: KAMPUNG LAUT RUMAHKU
Nomor KTP	: 1507080805940001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: M. AZIS	Nilai Swadaya	: Rp3.100.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor BNBA	: 2	Nama KPB	: KAMPUNG LAUT RUMAHKU
Nomor KTP	: 1506032502750001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ABDUL BASIT	Nilai Swadaya	: Rp2.970.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor BNBA	: 3	Nama KPB	: KAMPUNG LAUT RUMAHKU
Nomor KTP	: 1507084907650002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ROSIANA	Nilai Swadaya	: Rp2.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

- PROFIL BSPS 2025 - MAJELIS HIDAYAH

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : KUALA JAMBI
KELURAHAN/DESA : MAJELIS HIDAYAH
NO. SK PPK : 48/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 1	Nama KPB	: HIDAYAH BETUAH
Nomor KTP	: 1507081507750041	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MUSTOFA	Nilai Swadaya	: Rp4.300.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
			

Nomor SNBA	: 2	Nama KPB	: HIDAYAH BETUAH
Nomor KTP	: 1507083603420001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SAMSIAH	Nilai Swadaya	: Rp5.800.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
			

Nomor SNBA	: 3	Nama KPB	: HIDAYAH BETUAH
Nomor KTP	: 1507087112590002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RAMILAH	Nilai Swadaya	: Rp5.250.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : KUALA JAMBI
KELURAHAN/DESA : MAJELIS HIDAYAH
NO. SK PPK : 48/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: HIDAYAH BETUAH
Nomor KTP	: 1507085212770004	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SALAMIAH	Nilai Swadaya	: Rp3.350.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: HIDAYAH BETUAH
Nomor KTP	: 1507081708050001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: M. SYAFI	Nilai Swadaya	: Rp3.000.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

- PROFIL BSPS 2025 - TANJUNG SOLOK

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : KUALA JAMBI
KELURAHAN/DESA : TANJUNG SOLOK

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : TANJUNO SOLOK SERKAH	
Nomor KTP : 1507081507580010	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : M. SIDIK	Nilai Swadaya : Rp3.100.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 2	Nama KPB : TANJUNO SOLOK SERKAH	
Nomor KTP : 1507082303780001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : AB. ASSEK	Nilai Swadaya : Rp3.610.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 3	Nama KPB : TANJUNO SOLOK SERKAH	
Nomor KTP : 1507080906890001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : QANI	Nilai Swadaya : Rp3.610.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : KUALA JAMBI
KELURAHAN/DESA : TANJUNGPINANG

Nomor SNDA	: 4	Nama KPB	: TANJUNGPINANG BERKAS
Nomor KTP	: 1507081006870001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SUKIRMAN	Nilai Swadaya	: Rp3.100.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: TANJUNGPINANG BERKAS
Nomor KTP	: 1507081307800077	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SUDIRMAN	Nilai Swadaya	: Rp2.970.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: TANJUNG SOLOK SERIAH
Nomor KTP	: 1507081507710014	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: TENDRI RANRENG	Nilai Swadaya	: Rp3.050.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

- PROFIL BSPS 2025 - TELUK MAJELIS

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : KUALA JAMBI
KELURAHAN/DESA : TELUK MAJELIS
NO. SK PPK : 50/KPTS/PM4.3.2/2025

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : MAJELIS AMANAH	
Nomor KTP : 1507084201540001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : MASNAH	Nilai Swadaya : Rp3.700.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 2	Nama KPB : MAJELIS AMANAH	
Nomor KTP : 1507080106650002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : ZAINUDIN	Nilai Swadaya : Rp3.250.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 3	Nama KPB : MAJELIS AMANAH	
Nomor KTP : 1507081507690001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : SAPARUDIN	Nilai Swadaya : Rp3.250.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : KUALA JAMBI
KELURAHAN/DESA : TELUK MAJELIS
NO. SK PPK : 50/KPTS/PM.4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: MAJELIS AMANAH
Nomor KTP	: 1507082508090003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ANWAR	Nilai Swadaya	: Rp3.250.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: MAJELIS AMANAH
Nomor KTP	: 1507080706550002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ARIPIN	Nilai Swadaya	: Rp4.000.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: MAJELIS AMANAH
Nomor KTP	: 1507082606060001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SUPARNO	Nilai Swadaya	: Rp3.700.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : KUALA JAMBI
KELURAHAN/DESA : TELUK MAJELIS
NO. SK PPK : 50/KPTS/PM/4.3/2023

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: MAJELIS AMANAH
Nomor KTP	: 1507080908810001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RUSLI	Nilai Swadaya	: Rp3.250.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: MAJELIS AMANAH
Nomor KTP	: 1507064402850002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RUSLI	Nilai Swadaya	: Rp3.250.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 9	Nama KPB	: MAJELIS AMANAH
Nomor KTP	: 1507080105630001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ULAI	Nilai Swadaya	: Rp3.250.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

- PROFIL BSPS 2025 - MENDAHARA ILIR

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : MENDAHARA
KELURAHAN/DESA : MENDAHARA ILIR
NO. SK PPK : 51/KPTS/PM4.3.2/2025

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : MENDAHARA ILIR JAYA	
Nomor KTP : 1507031507650038	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : ZAINUDDIN MSI	Nilai Swadaya : Rp5.100.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 2	Nama KPB : MENDAHARA ILIR JAYA	
Nomor KTP : 1507031802760002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : ROSDIANA	Nilai Swadaya : Rp5.250.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 3	Nama KPB : MENDAHARA ILIR JAYA	
Nomor KTP : 1507031507720039	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : MUHTAR D	Nilai Swadaya : Rp5.250.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : MENDAHARA
KELURAHAN/DESA : MENDAHARA ILIR
NO. SK PPK : 51/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: MENDAHARA ILIR JAYA
Nomor KTP	: 1507034102640002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NURIAH	Nilai Swadaya	: Rp5.100.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: MENDAHARA ILIR JAYA
Nomor KTP	: 1507031307850015	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ANDI SUSANTO	Nilai Swadaya	: Rp5.250.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: MENDAHARA ILIR JAYA
Nomor KTP	: 1506004806760001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SUMIATI	Nilai Swadaya	: Rp5.350.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : MENDAHARA
KELURAHAN/DESA : MENDAHARA ILIR
NO. SK PPK : 51/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: MENDAHARA ILIR JAYA
Nomor KTP	: 1507035507040003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: REMMAH	Nilai Swadaya	: Rp3.200.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: MENDAHARA ILIR JAYA
Nomor KTP	: 1507033112000019	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: M. DANIS	Nilai Swadaya	: Rp3.250.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	:	9	Nama KPB	:	MENDAHARA ILIR JAYA
Nomor KTP	:	1507037112000016	Nilai Bantuan	:	Rp20.000.000
Nama	:	TITIN	Nilai Swadaya	:	Rp3.250.000
Kondisi 0%			Kondisi 30%		
					
			Kondisi 100%		
					

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : MENDAHARA
KELURAHAN/DESA : MENDAHARA ILIR
NO. SK PPK : 51/KPTS/PM4.3.2/2025

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: MENDAHARA ILIR JAYA
Nomor KTP	: 1507030408830003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: AHMADI	Nilai Swadaya	: Rp3.250.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	
Kondisi 0%		Kondisi 30%	
Kondisi 100%		Kondisi 100%	

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -
Kondisi 0%		Kondisi 30%	
Kondisi 0%		Kondisi 30%	
Kondisi 100%		Kondisi 100%	

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -
Kondisi 0%		Kondisi 30%	
Kondisi 0%		Kondisi 30%	
Kondisi 100%		Kondisi 100%	

- PROFIL BSPS 2025 - SUNGAI TAWAR

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : MENDAHARA
KELURAHAN/DESA : SURJAI TAWAR
NO. SK PPK : 52/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 1	Nama KPB	: HARAPAN INDAH
Nomor KTP	: 1571020404910041	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RIAN TO	Nilai Swadaya	: Rp7.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 50%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 2	Nama KPB	: HARAPAN INDAH
Nomor KTP	: 1507031008780003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SAIFUL ANWAR	Nilai Swadaya	: Rp3.750.000
Kondisi 0%		Kondisi 50%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 3	Nama KPB	: HARAPAN INDAH
Nomor KTP	: 1507031808950001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MUHAMMAD KHARIS	Nilai Swadaya	: Rp5.000.000
Kondisi 0%		Kondisi 50%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : MENDAHARA
KELURAHAN/DESA : SURDAI TAWAR
NO. SK PPK : 32/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: HARAPAN INDAH
Nomor KTP	: 1507031106160001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MARDIAH	Nilai Swadaya	: Rp3.950.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: HARAPAN INDAH
Nomor KTP	: 1507031703850002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ARIS	Nilai Swadaya	: Rp4.000.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: HARAPAN INDAH
Nomor KTP	: 1507031603930001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SUHETRI	Nilai Swadaya	: Rp6.300.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : MENDAHARA
KELURAHAN/DESA : SURDAI TAWAR
NO. SK PPK : 52/KPTS/PM.4.3/2023

Nomor SNBA : 7	Nama KPB : HARAPAN INDAH	
Nomor KTP : 1507030105810003	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : WAWAN HIDAYAT	Nilai Swadaya : Rp3.400.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 8	Nama KPB : HARAPAN INDAH	
Nomor KTP : 1507031008870002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : SARIFUDIN	Nilai Swadaya : Rp6.000.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 9	Nama KPB : HARAPAN INDAH	
Nomor KTP : 1507030911700003	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : M NUR WAHID	Nilai Swadaya : Rp3.300.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : MENDAHARA
KELURAHAN/DESA : SURJAI TAWAR
NO. SK PPK : 32/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: HARAPAN INDAH
Nomor KTP	: 1905080506820002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ASD RAHMAN	Nilai Swadaya	: Rp6.000.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025 - LAGAN TENGAH

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : GERAGAI
KELURAHAN/DESA : LAGAN TENGAH
NO. SK PPK : 55/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 1	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507105507680004	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SITTI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 50%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 2	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507105010450001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SARNA	Nilai Swadaya	: Rp1.200.000
Kondisi 0%		Kondisi 50%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 3	Nama SPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507101507870007	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SUHAJMI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : GERAGAI
KELURAHAN/DESA : LAGAN TENGAH
NO. SK PPK : 55/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507107112550008	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ISATA	Nilai Swadaya	: Rp1.000.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507101605750001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: HARSILAH	Nilai Swadaya	: Rp1.000.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507015507900054	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: DEWI	Nilai Swadaya	: Rp1.000.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : GERAGAI
KELURAHAN/DESA : LAGAN TENGAH
NO. SK PPK : 53/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507105502790003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SALASIAH	Nilai Swadaya	: Rp1.000.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507104301820001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NURMALA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 9	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507101806750003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ARMAIN	Nilai Swadaya	: Rp1.800.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : GERAJAI
KELURAHAN/DESA : LAGAN TENGAH
NO. SK PPK : 55/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507105507520015	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NURMA	Nilai Swadaya	: Rp1.200.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
 150630+11024641 Dusun III Bang II Kecamatan Girija, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52056 150630+11024641 NURMA	 150630+11024641 Dusun III Bang II Kecamatan Girija, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52056 150630+11024641 NURMA	 150630+11024641 Dusun III Bang II Kecamatan Girija, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52056 150630+11024641 NURMA	
Nomor SNBA	: 11	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507105109810002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NURKHASANAHI	Nilai Swadaya	: Rp1.800.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
 150630+11024641 Dusun III Bang II Kecamatan Girija, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52056 150630+11024641 NURKHASANAHI	 150630+11024641 Dusun III Bang II Kecamatan Girija, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52056 150630+11024641 NURKHASANAHI	 150630+11024641 Dusun III Bang II Kecamatan Girija, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52056 150630+11024641 NURKHASANAHI	
Nomor SNBA	: 12	Nama KPB	: BERKAH
Nomor KTP	: 1507035907900004	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ENI IDA YULIANTI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
 150630+11024641 Dusun III Bang II Kecamatan Girija, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52056 150630+11024641 ENI IDA YULIANTI	 150630+11024641 Dusun III Bang II Kecamatan Girija, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52056 150630+11024641 ENI IDA YULIANTI	 150630+11024641 Dusun III Bang II Kecamatan Girija, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52056 150630+11024641 ENI IDA YULIANTI	

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : GERAGAI
KELURAHAN/DESA : LAGAN TENGAH
NO. SK PPK : 55/KPTS/PM.3.2/2023

Nomor SNBA : 13	Nama KPB : BERKAH
Nomor KTP : 1507100709790001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000
Nama : MADI	Nilai Swadaya : Rp1.000.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025 - LAGAN ULU

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : GEMANG
KELURAHAN/DESA : LAGAN ULU
NO. SK PPK : 54/KPTS/PM.3.2/2023

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : MAWAR
Nomor KTP : 1507101410040001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000
Nama : ILHAM	Nilai Swadaya : Rp1.000.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025 - PANDAN JAYA

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : GERAGAI
KELURAHAN/DESA : PANDAN JAYA
NO. SK PPK : 56/KPTS/PM4.3.2/2025

Nomor SNBA	: 2	Nama KPB	: MAWAR
Nomor KTP	: 150710430680001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MUSRIAH	Nilai Swadaya	: Rp1.800.000
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 3	Nama KPB	: MAWAR
Nomor KTP	: 1507101012820003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SARIFUL ANWAR	Nilai Swadaya	: Rp2.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%	
			

- PROFIL BSPS 2025 - PANDAN SEJAHTERA

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : GERAGAI
KELURAHAN/DESA : PANDAN SEJAHTERA
NO. SK PPK : 56/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA : 4	Nama KPB : MAWAR	
Nomor KTP : 1507104606780004	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : TUEIMAH	Nilai Swadaya : Rp15.000.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 5	Nama KPB : MAWAR	
Nomor KTP : 1507105008750004	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : AL ISROFI	Nilai Swadaya : Rp20.000.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 6	Nama KPB : MAWAR	
Nomor KTP : 1507100808580005	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : TARIGIAN	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : GERAJAI
KELURAHAN/DESA : PANDAN SEJAHTERA
NO. SK PPK : 56/KPTS/PM4.3.2/2023

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: MAWAR
Nomor KTP	: 150710060000001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: BEJAN	Nilai Swadaya	: Rp1.000.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025 - CATUR RAHAYU

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : DENDANG
KELURAHAN/DESA : CATUR RAHAYU

Nomor SNBA : 4	Nama KPB : MELATI
Nomor KTP : 1507061908950002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000
Nama : AGUS KRISTANTO	Nilai Swadaya : Rp6.000.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025 - KAMPUNG SINGKEP

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : MUARA SABAK BARAT
KELURAHAN/DESA : RANO

Nomor SNBA : 0	Nama KPB : MELATI
Nomor KTP : 1507074510750001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000
Nama : SUMIATI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025 – RANO

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : MUARA SABAK BARAT
KELURAHAN/DESA : RANG

Nomor SNBA : 0	Nama KPB : MELATI
Nomor KTP : 1507074510750001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000
Nama : SUMIATI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025 - TELUK DAWAN

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : MUARA SABAK BARAT
KELURAHAN/DESA : TELUK DAWAN

Nomor SNBA	: 3	Nama KPB	: MELATI
Nomor KTP	: 1507072105930004	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: TENDRI WAHYU.S	Nilai Swadaya	: Rp5.000.000
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: MELATI
Nomor KTP	: 1507074307700001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SARINAH	Nilai Swadaya	: Rp5.000.000
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: MELATI
Nomor KTP	: 1507074000560001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RICHANA	Nilai Swadaya	: Rp2.000.000
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%	
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : MUARA SABAK TIMUR
KELURAHAN/DESA : LAMBUR

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : LAMBUR JAYA	
Nomor KTP : 1507016506740002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : IRMA	Nilai Swadaya : Rp1.000.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 2	Nama KPB : LAMBUR JAYA	
Nomor KTP : 1507010708920004	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : MUHAMMAD UNUS	Nilai Swadaya : Rp1.800.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 3	Nama KPB : LAMBUR JAYA	
Nomor KTP : 1903015200860006	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : MARZ	Nilai Swadaya : Rp1.000.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : MUARA SABAK TIMUR
KELURAHAN/DESA : LAMBUR

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: LAMBUR JAYA
Nomor KTP	: 1607150806700001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: BASRI	Nilai Swadaya	: Rp1.000.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: LAMBUR JAYA
Nomor KTP	: 1272021405670001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RIDWAN NASUTION	Nilai Swadaya	: Rp1.000.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: LAMBUR JAYA
Nomor KTP	: 1507010112750002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RIDWAN	Nilai Swadaya	: Rp1.800.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : MUARA SABAK TIMUR
KELURAHAN/DESA : LAMBUR

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: LAMBUR JAYA
Nomor KTP	: 1507011507540037	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: CETTANO	Nilai Swadaya	: Rp1.800.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: LAMBUR JAYA
Nomor KTP	: 1507015809750002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SAHERI BANONG	Nilai Swadaya	: Rp1.000.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 9	Nama KPB	: LAMBUR JAYA
Nomor KTP	: 1507015305800001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: INDO AKE	Nilai Swadaya	: Rp1.300.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : MUARA SABAK TIMUR
KELURAHAN/DESA : LAMBUR

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: LAMBUR JAYA
Nomor KTP	: 150701050880002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MUSTAM	Nilai Swadaya	: Rp1.000.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025 - NIPAH PANJANG I

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : NIPAH PANJANG
KELURAHAN/DESA : NIPAH PANJANG I

Nomor SNBA	: 1	Nama KPB	: Nipah Gemilang
Nomor KTP	: 1507021507790037	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: AMRIZAL	Nilai Swadaya	: Rp7.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 2	Nama KPB	: Nipah Gemilang
Nomor KTP	: 1507025507570100	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: HUSAIMA	Nilai Swadaya	: Rp5.000.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 3	Nama KPB	: Nipah Gemilang
Nomor KTP	: 1507025411800001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MISRA	Nilai Swadaya	: Rp6.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : NIPAH PANJANG
KELURAHAN/DESA : NIPAH PANJANG I

Nomor SNBA : 4	Nama KPB : Nipah Gemilang	
Nomor KTP : 1507025508850003	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : SALMAWATI	Nilai Swadaya : Rp7.400.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 5	Nama KPB : Nipah Gemilang	
Nomor KTP : 1507027105700001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : MAU SYARAH	Nilai Swadaya : Rp8.200.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 6	Nama KPB : Nipah Gemilang	
Nomor KTP : 1507021007710002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : TAHANG	Nilai Swadaya : Rp6.300.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : NIPAH PANJANG
KELURAHAN/DESA : NIPAH PANJANG I

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: Nipah Gemilang
Nomor KTP	: 1507024504940002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NUR AZIZAH	Nilai Swadaya	: Rp6.700.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: Nipah Gemilang
Nomor KTP	: 1507025507550017	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MILA	Nilai Swadaya	: Rp7.200.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 9	Nama KPB	: Nipah Gemilang
Nomor KTP	: 2104011409660001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ROSLAN	Nilai Swadaya	: Rp7.300.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : NIPAH PANJANG
KELURAHAN/DESA : NIPAH PANJANG I

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: Nipah Gemilang
Nomor KTP	: 1507023112710032	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: HERI	Nilai Swadaya	: Rp6.400.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 11	Nama KPB	: Nipah Gemilang
Nomor KTP	: 1507026612550001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ALFIAN	Nilai Swadaya	: Rp7.400.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

- PROFIL BSPS 2025 – PEMUSIRAN

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
KECAMATAN : NIPAH PANJANG
KELURAHAN/DESA : PEMUSIRAN

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : Maju Mandiri
Nomor KTP : 1507020803780004	Nilai Bantuan : Rp20.000.000
Nama : MURSALIM SUSANTONO	Nilai Swadaya : Rp11.200.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

3.2. Perdesaan

- PROFIL BSPS 2025 - TELUK PANJANG

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNGO
KECAMATAN : BATHIN III
KELURAHAN/DESA : TELUK PANJANG

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : KPB-1	
Nomor KTP : 1508111701850001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : M.NASIR	Nilai Swadaya : Rp12.047.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 2	Nama KPB : KPB-1	
Nomor KTP : 1508110101780007	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : SAYUTI	Nilai Swadaya : Rp13.568.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 3	Nama KPB : KPB-1	
Nomor KTP : 1508110206920001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : RUDI	Nilai Swadaya : Rp11.061.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : BATHIN III
KELURAHAN/DESA : TELUK PANJANG

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508114101900002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MIKA HERLINA SASMITA	Nilai Swadaya	: Rp13.268.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508105705960001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: AYU LESTARI	Nilai Swadaya	: Rp14.104.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508110402820002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ADRIAN TANJUNG	Nilai Swadaya	: Rp9.010.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : BATHIN III
KELURAHAN/DESA : TELUK PANJANG

Nomor SNDA	: 7	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 150811710890001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SANTI WISMA DIAH	Nilai Swadaya	: Rp12.036.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508112109810001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: JASMIRI	Nilai Swadaya	: Rp8.894.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 9	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508051212090002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MUSLI ROMADON	Nilai Swadaya	: Rp11.966.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : BATHIN III
KELURAHAN/DESA : TELUK PANJANG

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508116208880003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NIRMASANA	Nilai Swadaya	: Rp16.789.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
			

Nomor SNBA	: 11	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508111909880002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: TONI	Nilai Swadaya	: Rp15.738.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
			

Nomor SNBA	: 12	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508114804960001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: USMAYANI	Nilai Swadaya	: Rp11.435.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : BATHIN III
KELURAHAN/DESA : TELUK PANJANG

Nomor SNBA	: 13	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508115106820003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: AMINAH	Nilai Swadaya	: Rp11.413.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 14	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508116006780001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: IDA YATI	Nilai Swadaya	: Rp7.613.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 15	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508134207970001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: YUSNA	Nilai Swadaya	: Rp14.142.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

- PROFIL BSPS 2025 – PURWOSARI

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : PELEPAT ILIR
KELURAHAN/DESA : PURWOSARI

Nomor SNBA	: 1	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508094508560001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: WATIMAH	Nilai Swadaya	: Rp10.820.000
Kondisi 0%		Kondisi 50%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 2	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508094806910001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NOVIANUNINGSIH	Nilai Swadaya	: Rp16.207.000
Kondisi 0%		Kondisi 50%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 3	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1509042111720003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ASMARDI	Nilai Swadaya	: Rp10.877.000
Kondisi 0%		Kondisi 50%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : PELEPAT ILIR
KELURAHAN/DESA : PURWOSARI

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 1311014808930002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: YELFI SUKRIA	Nilai Swadaya	: Rp16.188.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 1508096305800001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: KRISNA WATI	Nilai Swadaya	: Rp9.266.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 1508094608840001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: DEWI RIANTI	Nilai Swadaya	: Rp13.490.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : PELEPAT ILIR
KELURAHAN/DESA : PURWOSARI

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 3211014201700003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RITA ROHAYANI	Nilai Swadaya	: Rp17.298.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 1508090810840002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: TRI WIYOTO	Nilai Swadaya	: Rp16.703.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 9	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 1508091608700001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: WARDI	Nilai Swadaya	: Rp12.885.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : PELEPAT ILIR
KELURAHAN/DESA : PURWOSARI

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: KPB-1
Nomor KTP	: 150809670000002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: DEWI SELVIANA RAHAYU NINOSIH	Nilai Swadaya	: Rp11.822.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 11	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 1508094506810002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SITI LESTARI	Nilai Swadaya	: Rp16.250.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 12	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 1502140509670001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NASRUL	Nilai Swadaya	: Rp14.604.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : PELEPAT ILIR
KELURAHAN/DESA : PURWOSARI

Nomor SNBA : 13	Nama KPB : KPB-2	
Nomor KTP : 1508091002750004	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : MUHAMMAD SAHID	Nilai Swadaya : Rp14.604.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 14	Nama KPB : KPB-1	
Nomor KTP : 1508093108650001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : EKO HERY JUNARTO	Nilai Swadaya : Rp8.794.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 15	Nama KPB : KPB-1	
Nomor KTP : 150809410870001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : MISNAWATI	Nilai Swadaya : Rp12.855.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : PELEPAT ILIR
KELURAHAN/DESA : PURWOSARI

Nomor SNBA : 16	Nama KPB : KPB-2	
Nomor KTP : 150809050690003	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : KHA518 BASKORD	Nilai Swadaya : Rp19.952.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 17	Nama KPB : KPB-1	
Nomor KTP : 3513161210840003	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : CHOIRUL SOLEH	Nilai Swadaya : Rp9.960.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 18	Nama KPB : KPB-2	
Nomor KTP : 1508090107500005	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : SAERAN	Nilai Swadaya : Rp11.139.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : PELEPAT ILIR
KELURAHAN/DESA : PURWOSARI

Nomor SNBA	: 19	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 1508092504700003	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SARWID	Nilai Swadaya	: Rp11.569.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 20	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 1508093508050002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MURSIH NEM	Nilai Swadaya	: Rp20.193.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 21	Nama KPB	: KPB-2
Nomor KTP	: 1508096304880001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: GANGSAR LESTARI	Nilai Swadaya	: 15.010.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

- PROFIL BSPS 2025 - BUKIT KEMANG

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : TANAH TUMBUH
KELURAHAN/DESA : BUKIT KEMANG

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu	
Nomor KTP : 1508012907700001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : A. SAPIAWI	Nilai Swadaya : Rp12.543.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 2	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu	
Nomor KTP : 1508010410930001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : BAHARI	Nilai Swadaya : Rp15.577.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 3	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu	
Nomor KTP : 1508010510890002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : SANI YAMIN	Nilai Swadaya : Rp15.856.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : TANAH TUMBUH
KELURAHAN/DESA : BUKIT KEMANG

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP	: 1508010811910001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SUHARI	Nilai Swadaya	: Rp21.171.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
14758-1101392 E16-000		14758-1101392 E16-000	
			
14758-1101392 E16-000		14758-1101392 E16-000	

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP	: 1508015303900004	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: TRI MULYANI SETYAWATI	Nilai Swadaya	: Rp18.246.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNDA	: 6	Nama KPB	: Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP	: 1508012106930001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: HALIM	Nilai Swadaya	: Rp18.141.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : TANAH TUMBUH
KELURAHAN/DESA : BUKIT KEMANG

Nomor SNBA : 7	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu	
Nomor KTP : 1508017012960002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : ULI LAMPIAH	Nilai Swadaya : Rp19.045.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 8	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu	
Nomor KTP : 1508010600800003	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : MUZA	Nilai Swadaya : Rp18.525.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 9	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu	
Nomor KTP : 1508010910950003	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : FAUZI	Nilai Swadaya : Rp19.720.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : TANAH TUMBUH
KELURAHAN/DESA : BUKIT KEMANG

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP	: 1508015007010001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SULASTRI	Nilai Swadaya	: Rp19.470.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 11	Nama KPB	: Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP	: 1508014107870014	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: TIMARSAH	Nilai Swadaya	: Rp19.400.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 12	Nama KPB	: Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP	: 1508014709900001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: UMIKALSUM	Nilai Swadaya	: Rp17.700.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : TANAH TUMBUH
KELURAHAN/DESA : BUKIT KEMANG

Nomor SNBA : 13	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu	
Nomor KTP : 1508014307020001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : HALIMAH TUNSAADIAH	Nilai Swadaya : Rp19.344.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 14	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu	
Nomor KTP : 1508014607860002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : LISNAWATI	Nilai Swadaya : Rp17.004.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 15	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu	
Nomor KTP : 1508014106870001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : DAHYATI	Nilai Swadaya : Rp22.517.500	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNGO
KECAMATAN : TANAH TUMBUH
KELURAHAN/DESA : BUKIT KEMANG

Nomor SNBA	: 16	Nama KPB	: Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP	: 1508055302920001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SUSI SUSANTI	Nilai Swadaya	: Rp21.655.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 17	Nama KPB	: Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP	: 1508016807980002	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ANAMARIA	Nilai Swadaya	: Rp21.607.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 19	Nama KPB	: Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP	: 1508014910990001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: DAULIS	Nilai Swadaya	: Rp17.700.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KAB. BUNDO
KECAMATAN : TANAH TUMBUH
KELURAHAN/DESA : BUKIT KEMANG

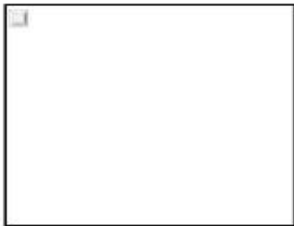
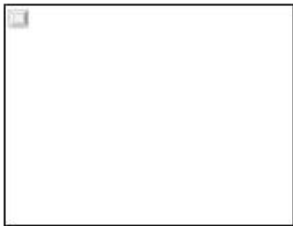
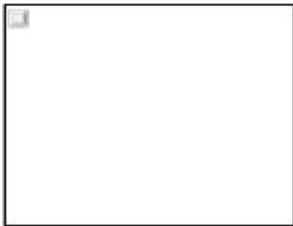
Nomor SNBA : 18	Nama KPB : Bukit Kemang Bersatu
Nomor KTP : 1508014407000001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000
Nama : NURASYAH	Nilai Swadaya : Rp19.720.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

3.3. Perkotaan

- PROFIL BSPS 2025_TALANG BAKUNG

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PAAL MERAH
KELURAHAN/DESA : TALANG SAKUNG

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : KPB 1	
Nomor KTP : 1571021203870281	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : PRIYONO	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 2	Nama KPB : KPB 1	
Nomor KTP : 1571021604710061	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : RD MISRANSYAH	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 3	Nama KPB : KPB 1	
Nomor KTP : 1571021105720021	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : SUMPOMO	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PAAL MERAH
KELURAHAN/DESA : TALANG SAKUNG

Nomor SNBA : 4	Nama KPB : KPB 1	
Nomor KTP : 3606075202810002	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : YANI PERTIWI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 5	Nama KPB : KPB 1	
Nomor KTP : 1571025502850121	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : IDA SRI RAHAYU, HS	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 6	Nama KPB : KPB 1	
Nomor KTP : 1571024703510021	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : KIPPYAH	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PAAL MERAH
KELURAHAN/DESA : TALANG SAKUNG

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: KPB 1
Nomor KTP	: 1571024801690081	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NINOSIH	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: KPB 1
Nomor KTP	: 1571026004750041	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SRI WAHYUNI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

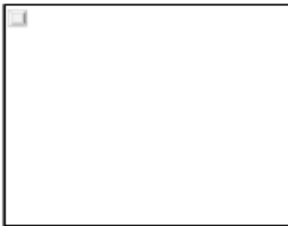
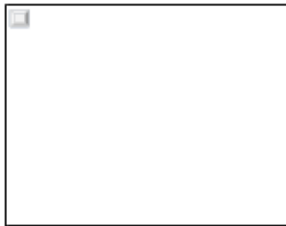
Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: KPB 1
Nomor KTP	: 1571025004040021	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MASRYA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
 KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
 KECAMATAN : PAAL MERAH
 KELURAHAN/DESA : TALANG BAKUNG

Nomor SNBA : - Nomor KTP : - Nama : -	Nama KPB : - Nilai Bantuan : - Nilai Swadaya : -	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : - Nomor KTP : - Nama : -	Nama KPB : - Nilai Bantuan : - Nilai Swadaya : -	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : - Nomor KTP : - Nama : -	Nama KPB : - Nilai Bantuan : - Nilai Swadaya : -	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PAAL MERAH
KELURAHAN/DESA : TALANG BAKUNG

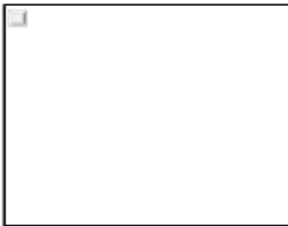
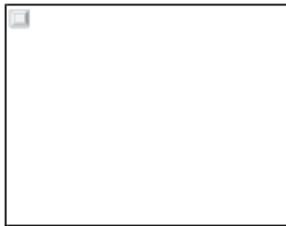
Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PAAL MERAH
KELURAHAN/DESA : TALANG BAKUNG

Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-
Kondisi 0%			Kondisi 30%		
Kondisi 0%			Kondisi 30%		

Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-
Kondisi 0%			Kondisi 30%		
Kondisi 0%			Kondisi 30%		

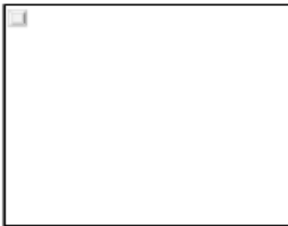
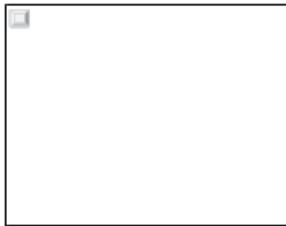
Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-
Kondisi 0%			Kondisi 30%		
Kondisi 0%			Kondisi 30%		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
 KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
 KECAMATAN : PAAL MERAH
 KELURAHAN/DESA : TALANG BAKUNG

Nomor SNBA : - Nomor KTP : - Nama : -	Nama KPS : - Nilai Bantuan : - Nilai Swadaya : -	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : - Nomor KTP : - Nama : -	Nama KPS : - Nilai Bantuan : - Nilai Swadaya : -	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : - Nomor KTP : - Nama : -	Nama KPS : - Nilai Bantuan : - Nilai Swadaya : -	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
 KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
 KECAMATAN : PAAL MERAH
 KELURAHAN/DESA : TALANG BAKUNG

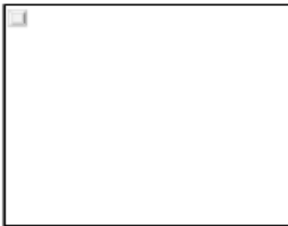
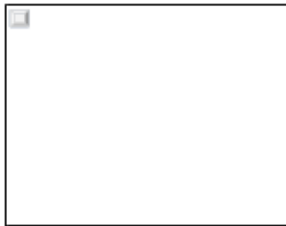
Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PAAL MERAH
KELURAHAN/DESA : TALANG BAKUNG

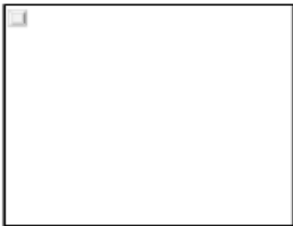
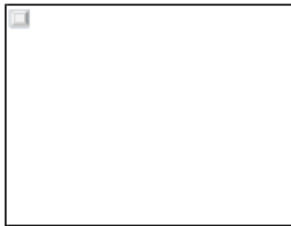
Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	:	-	Nama KPB	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PAAL MERAH
KELURAHAN/DESA : TALANG BAKUNG

Nomor SNBA	:	-	Nama KPS	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	:	-	Nama KPS	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	:	-	Nama KPS	:	-
Nomor KTP	:	-	Nilai Bantuan	:	-
Nama	:	-	Nilai Swadaya	:	-

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025_PENYENGAT RENDAH

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAI PURA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : KPB III	
Nomor KTP : 1571041112730021	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : ABDILLAH	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 2	Nama KPB : KPB III	
Nomor KTP : 1571015212610122	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : ZUBAIDAH	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 3	Nama KPB : KPB III	
Nomor KTP : 1571015708900001	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : FITRIYANTI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAI PURA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

Nomor SNBA : 4	Nama KPB : KPB III	
Nomor KTP : 1571011705800101	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : M. LUYUS	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 5	Nama KPB : KPB III	
Nomor KTP : 1571010107030221	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : ALWI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 6	Nama KPB : KPB III	
Nomor KTP : 1571012707810061	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : RD M ZEN	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAI PURA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

Nomor SNDA	: 7	Nama KPB	: KPB III
Nomor KTP	: 1571016004760101	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RTS NAFSAH	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: KPB IV
Nomor KTP	: 1571016108050021	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: NINO AYU	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 9	Nama KPB	: KPB III
Nomor KTP	: 1571015010870162	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RATUMAS RODIAH	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAI PURA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: KPB III
Nomor KTP	: 1571014505570041	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RTS RUSNA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 11	Nama KPB	: KPB IV
Nomor KTP	: 1571014312540001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RATUMAS SAIDAH	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 12	Nama KPB	: KPB IV
Nomor KTP	: 1571014807680061	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ZAHARUL UMI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAI PURA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

Nomor SNBA : 13	Nama KPB : KPB IV	
Nomor KTP : 1505011810900003	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : YANTO WAHYUDI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 14	Nama KPB : KPB IV	
Nomor KTP : 1571010505050101	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : RD SABI SALEH	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 15	Nama KPB : KPB IV	
Nomor KTP : 1571011803810021	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : SULAIMAN	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAI PURA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

Nomor SNBA	: 16	Nama KPB	: KPB IV
Nomor KTP	: 1571010508670001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RD HERMAIN	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 17	Nama KPB	: KPB IV
Nomor KTP	: 1571010608790201	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RD ASMAADI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNDA	: 18	Nama KPB	: KPB IV
Nomor KTP	: 1571015002720041	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SARIFA MARIA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAI PURA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

Nomor SNBA : 19	Nama KPB : KPB IV
Nomor KTP : 1571010605620081	Nilai Bantuan : Rp20.000.000
Nama : RD HASAN NUDIN	Nilai Swadaya : Rp1.500.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAIPUKA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

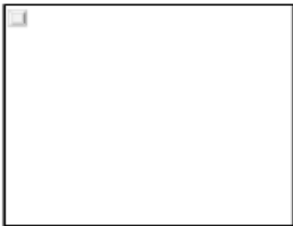
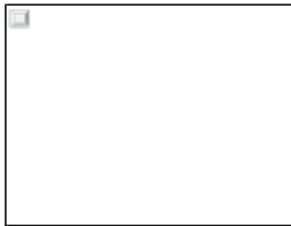
Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAI PURA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : -	Nama KPB : -
Nomor KTP : -	Nilai Bantuan : -
Nama : -	Nilai Swadaya : -

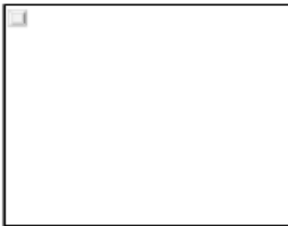
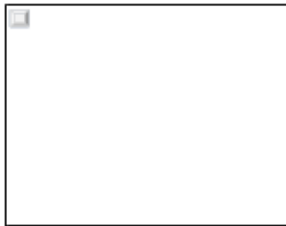
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : TELANAI PURA
KELURAHAN/DESA : PENYENGAT RENDAH

Nomor SNBA : - Nomor KTP : - Nama : -	Nama KPB : - Nilai Bantuan : - Nilai Swadaya : -	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : - Nomor KTP : - Nama : -	Nama KPB : - Nilai Bantuan : - Nilai Swadaya : -	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : - Nomor KTP : - Nama : -	Nama KPB : - Nilai Bantuan : - Nilai Swadaya : -	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

- PROFIL BSPS 2025_ LEGOK

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : DANAU SIPIN
KELURAHAN/DESA : LEOKOK

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : KPB II	
Nomor KTP : 1571015003830141	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : NURYANI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 2	Nama KPB : KPB II	
Nomor KTP : 1571017112370081	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : JAIMAH	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		
Nomor SNBA : 3	Nama KPB : KPB II	
Nomor KTP : 1571015307880081	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : MELIYATI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : DANAU SIPIN
KELURAHAN/DESA : LEOK

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571016306880041	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: YUSNITA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571016009070021	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SITI SOEFAH	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571017112470321	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SA'AMAH	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : DANAU SIPIN
KELURAHAN/DESA : LEOKOK

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571015001750001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: JASNETA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571014507450041	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: ASMAWATI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 9	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571014506830021	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SAFITRI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : DANAU SIPIN
KELURAHAN/DESA : LEOK

Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1610086008930001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RICI ASTREA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
159435 + 103.6021 RICI ASTREA		159435 + 103.6021 RICI ASTREA	

Nomor SNBA	: 11	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1505076208900001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: TINA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
159435 + 103.6021 TINA		159435 + 103.6021 TINA	

Nomor SNBA	: 12	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571014506620122	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RUMANI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
159435 + 103.6021 RUMANI		159435 + 103.6021 RUMANI	

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : DANAU SIPIN
KELURAHAN/DESA : LEOK

Nomor SNBA	: 13	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571014303850201	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: DINA SUMARNI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 14	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571014103980021	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: FENNY HARANTI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

Nomor SNBA	: 15	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571013112710121	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: MATNUR	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%	
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : DANAU SIPIN
KELURAHAN/DESA : LEOK

Nomor SNBA	: 16	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571011200840001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: YUSMIN	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 17	Nama KPB	: KPB II
Nomor KTP	: 1571013508750021	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: KHALIMATUS SYADYAH	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

- PROFIL BSPS 2025_MUDUNG LAUT

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PELAYANGAN
KELURAHAN/DESA : MUDUNG LAUT

Nomor SNBA : 1	Nama KPB : KPB V	
Nomor KTP : 1571050504700021	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : SYARIF RAHMAN	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 2	Nama KPB : KPB V	
Nomor KTP : 15710506212910021	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : EKAWATI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA : 3	Nama KPB : KPB V	
Nomor KTP : 1571055712790021	Nilai Bantuan : Rp20.000.000	
Nama : EKMAWATI	Nilai Swadaya : Rp1.500.000	
Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%
		

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PELAYANGAN
KELURAHAN/DESA : MUDUNG LAUT

Nomor SNBA	: 4	Nama KPB	: KPB V
Nomor KTP	: 1571056606740001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: RAHANA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 5	Nama KPB	: KPB V
Nomor KTP	: 1571056812650001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SAWIA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

Nomor SNBA	: 6	Nama KPB	: KPB V
Nomor KTP	: 1571050212470001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: M AMIR HUSNI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PELAYANGAN
KELURAHAN/DESA : MUDUNG LAUT

Nomor SNBA	: 7	Nama KPB	: KPB V
Nomor KTP	: 1571051005610001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: M. AMIN	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 8	Nama KPB	: KPB V
Nomor KTP	: 1571051104010001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: S. HASAN	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			
Nomor SNBA	: 9	Nama KPB	: KPB V
Nomor KTP	: 1571054405840041	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: JAMILA	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000
Kondisi 0%		Kondisi 30%	Kondisi 100%
			

**PROFIL PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI
KECAMATAN : PELAYANGAN
KELURAHAN/DESA : MUDUNG LAUT

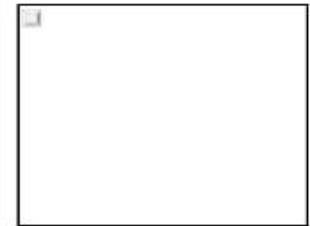
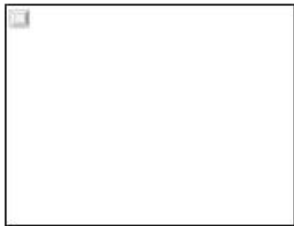
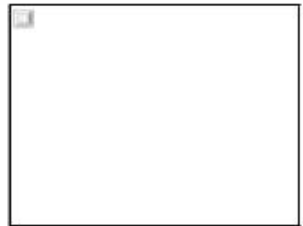
Nomor SNBA	: 10	Nama KPB	: KPB V
Nomor KTP	: 1571054808780041	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: SUSI HARIYANTI	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	: 11	Nama KPB	: KPB V
Nomor KTP	: 1571044502570001	Nilai Bantuan	: Rp20.000.000
Nama	: WANNI ISMAEL	Nilai Swadaya	: Rp1.500.000

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

Nomor SNBA	: -	Nama KPB	: -
Nomor KTP	: -	Nilai Bantuan	: -
Nama	: -	Nilai Swadaya	: -

Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%
		

4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Tahun 2025 Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Sosialisasi dan Penandatanganan Kontrak TFL BPS Provinsi Jambi TA 2025 10 September 2025	
2	Survey Harga Toko untuk Penentuan HPS BPS TA 2025 19 September 2025	
3	Survey Lokasi Rumah Susun MA Jambi 23 September 2025	

4	Survey Harga (HPS) Batching Plan dan Bahan Bangunan Rumah Susun 30 September 2025	
5	Sosialisasi dan Penandatanganan Kontrak TFL BPS Provinsi Jambi TA 2025 10 September 2025	
6	Survey Harga Toko untuk Penentuan HPS BPS TA 2025 19 September 2025	

7	<i>Survey Lokasi Rumah Susun MA Jambi</i> <i>23 September 2025</i>	
8	<i>Survey Harga (HPS) Batching Plan dan Bahan Bangunan Rumah Susun</i> <i>30 September 2025</i>	
9	<i>Seremoni Pelaksanaan BSPS TA 2025 di Sungai Penuh</i> <i>04 Oktober 2025</i>	

10	<i>Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi Deliniasi Perdesaan TA 2025</i> 29 Oktober 2025	
11	<i>Pemantauan Pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi Deliniasi Perdesaan TA 2025</i> 30 Oktober 2025	
12	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Muaro Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> 10 November 2025	

13	<i>Pengecekan Lahan CNC Lahan Usulan MA Rumah Susun MA Provinsi Jambi</i> <i>11 November 2025</i>	
14	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Batanghari Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>11 November 2025</i>	
15	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Muaro Bungo Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>12 November 2025</i>	

16	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Tebo Provinsi Jambi TA 2025</i> 13 November 2025	
17	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kerinci Provinsi Jambi TA 2025</i> 14 November 2025	
18	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kota Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> 14 November 2025	

19	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kota Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> 14 November 2025	
20	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kota Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> 27 November 2025	
21	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Sarolangun Provinsi Jambi TA 2025</i> 04 Desember 2025	

22	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Sarolangun Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>04 Desember 2025</i>	
23	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Merangin Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>05 Desember 2025</i>	
24	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Bungo Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>05 Desember 2025</i>	

25	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Muaro Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>09 Desember 2025</i>	
26	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Muaro Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>09 Desember 2025</i>	
27	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>10 Desember 2025</i>	

28	<i>Kunker DPR-RI Edi Pirwanto - Kab Sarolangun</i> <i>15 - 16 Desember 2025</i>	
29	<i>Penandatanganan Kontrak MK PT Alocita Mandiri</i> <i>18 Desember 2025</i>	
30	<i>Rapat Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>17 - 19 Desember 2025</i>	

31	<i>Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Fisik CV Riau Andalan Utama</i> <i>19 Desember 2025</i>	
32	<i>Pre Construction Meeting (PCM) Rumah Susun MA Provinsi Jambi</i> <i>22 Desember 2025</i>	
33	<i>Penyerahan Lahan Rumah Susun MA Provinsi Jambi</i> <i>22 Desember 2025</i>	